



**OPTIMALISASI EKOWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL
SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI
DESA WISTA SEPAKUNG, BANYUBIRU, KAB. SEMARANG
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Skripsi ini disajikan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah

oleh:

Feliq Anggriawan

1201415072

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul “Optimalisasi Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang” telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23 September 2019

Panitia Ujian Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Achmad Rifa'i, M.Pd

Dr.Utsman, M.Pd

NIP.195708041981031006

NIP.195904211984031002

Penguji 1,

Penguji 2,

Dr.Sungkowo Edy Mulyono, M.Si

Abdul Malik, S.Pd., M.Pd

NIP.19680704200504001

NIP.198103102015041004

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd

NIP.195603011985111001

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Optimalisasi Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang” serta isi skripsi ini merupakan benar-benar karya saya, bukan meniru/menjiplak karya orang lain. Jika ada pendapat atau temuan orang lain maka yang terdapat dalam laporan skripsi saya kutip dengan berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 23 September 2019

Feliq anggriawan

1201415072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Fokus be plan karena semua itu sudah direncanakan oleh ALLAH SWT maka berusahallah!!!” (FA)

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu sebagai sumber motivasi yang selalu support saya dari kecil hingga saat ini bisa duduk di bangku perkuliahan
2. Saudara-saudara saya yang selalu memberi masukan dan pengertian untuk selalu belajar dan tak kenal menyerah untuk selalu mencoba
3. Keluarga besar Rombel 2 angkatan 2015
4. Kawan-kawan Karang Taruna Kelurahan Banyumanik yang selalu memberi semangat dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini
5. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang
6. Almamater tercinta Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan Rahmat, inayah dan hidayahnya, penulisan skripsi ini menyusun hingga menyelesaikan laporan skripsi dengan judul **“Optimalisasi Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Upaya Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepakung”** dengan lancar.

Dalam skripsi ini penulis sangat bersyukur, karena telah banyak pihak yang menyupport dan membantu penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu untuk penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof Tri Joko Raharjo., M.Pd. Selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak membantu membimbing, mengarahkan, memberi saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Dr. Utsman., M.Pd. Selaku Kepala Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Tri Suminar., M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang banyak membantu saya dan membimbing saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Stakeholder Pemerintah Desa dan Pokdarwis Lembah Telomoyo Desa Sepakung yang telah memberi kesempatan saya untuk melakukan penelitian dan support dalam penelitian saya.
5. BEM FIP 2016 & 2017 yang telah banyak mengajarkan banyak pengalaman hidup berharga dalam berorganisasi
6. Karang Taruna Kelurahan Banyumanik yang selalu menemani dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan , dengan segala kemampuan dan pengalaman penulis. Dengan ini penulis menerima saran dan masukan dalam perbaikan laporan skripsi ini Terimakasih.

Semarang, 23 September 2019

Feliq anggriawan

ABSTRAK

Feliq anggriawan 2019. “*Optimalisasi Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sepakung*”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Prof.Tri Joko Raharjo,. M.Pd

Kata Kunci : pemberdayaan, optimalisasi ekowisata, kesejahteraan masyarakat.

Desa Sepakung merupakan salah satu Desa Wisata yang menerapkan ekowisata berbasis masyarakat dalam mengembangkan Desa wisataya, tujuan peneliti dalam penelitian ini : (1) Mendeskripsikan optimalisasi ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Sepakung, (2) Mendeskripsikan Hambatan dan Pendukung dalam optimalisasi ekowisata berbasis kearifan lokal ini. (3) Mendeskripsikan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Sepakung.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.. Subyek peneliti ada 9 orang 2 dari Ketua pokdarwis dan Pj Obyek wisata, 1 bapak kepala desa Sepakung, 3 dari masyarakat Desa Sepakung yang berpartisipasi, 3 dari wisatawan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil Penelitian dari optimalisasi ekowisata berbasis kearifan lokal yang dimulai dari proses pemberdayaan yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa terampil, rensponsif dan bisa bekerjasama butuh proses yang dilakukan pokdarwis dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat Desa, akan tetapi dengan perjuangan gigih masyarakat tanpa dipaksa pun mau mengelola ekowisata ini karena mereka mengelola dengan inisiatif sendiri. Proses optimalisasi yang menjadi penghambat utama yaitu terkait dana untuk faktorf pendukung nya yaitu masyarakat yang aktif dan bisa bekerjasama dengan baik. Saran untuk pengelola segera melakukan regenerasi dan pengkaderan dalam mengelola biar lebih masif dalam memasarkan dan mengenalkan Desa Wisata Sepakung lebih dikenal tidak hanya di Jawa Tengah. Tapi juga terkenal sampai mancanegara dan menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN KELULUSAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2.....	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Pemberdayaan.....	10
2.2 Proses Pemberdayaan.....	14
2.3 Indikator Pemberdayaan	16
2.4 Partisipasi.....	17
2.5 Kelembagaan dan Kelompok.....	20
2.6 Proses Optimalisasi.....	21
2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Optimalisasi	22
2.7.1 <i>Komunikasi</i>	24
2.7.2 <i>Sumber Daya</i>	25
2.7.3 <i>Struktur Birokrasi</i>	27
2.7.4 <i>Lingkungan</i>	28

2.8 Faktor keberhasilan atau kegagalan Optimalisasi.....	29
2.9 Pariwisata.....	30
2.9.1 Pengertian Pariwisata	30
2.9.2 Dampak Pariwisata	32
2.9.3 Pengelolaan Pariwisata.....	38
2.10 Ekowisata berbasis masyarakat (Community based Ecotourism).....	39
2.10.1 Definisi ekowisata	39
2.10.2 Ekowisata dari segi konsep.....	41
2.10.3 Ekowisata dari segi pasar.....	42
2.10.4 Tahapan ekowisata	44
2.10.5 Indikator Keberhasilan Community Based EcoTourism.....	48
2.11 Kesejahteraan.....	49
2.11.1 Pengertian Kesejahteraan	49
2.11.2 Tujuan kesejahteraan masyarakat	54
2.11.3 Fungsi Kesejahteraan sosial.....	56
2.11.4 Fokus pembangunan Kesejahteraan sosial.....	57
2.11.5 Pendekatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.....	58
2.12 Desa Wisata Sepakung	60
2.13 Penelitian yang relevan	61
2.14 Kerangka Berpikir.....	62
BAB III.....	67
METODE PENELITIAN	67
3.1 Pendekatan Penelitian	67
3.2 Tempat dan Waktu penelitian	68
3.3 Fokus Penelitian.....	68
3.4 Subjek Penelitian	69
3.5 Sumber Data.....	70
3.5.1 Data Primer	70
3.5.2 Data Sekunder.....	71
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	72

3.6.1	<i>Observasi</i>	72
3.6.2	<i>Wawancara</i>	73
3.6.3	<i>Dokumentasi</i>	74
3.7	Instrumen Penelitian	74
3.8	Keabsahan Data	75
3.9	Teknik Analisis Data	76
BAB IV		78
HASIL DAN PEMBAHASAN		79
4.1	Hasil Penelitian.....	79
4.1.1	<i>Letak Geografis</i>	79
4.1.2	<i>Batas Wilayah Desa Sepakung</i>	80
4.1.3	<i>Luas Wilayah Desa Sepakung</i>	81
4.1.4	<i>Kependudukan</i>	82
4.1.5	<i>Sejarah berdirinya Desa Wisata Sepakung</i>	82
4.1.6	<i>Profil Desa Sepakung</i>	85
4.1.7	<i>Proses Pemberdayaan</i>	96
4.1.8	<i>Optimalisasi Sumber Daya Manusia di Desa Sepakung (Indikator Community Based Ecotourism menurut Suansri)</i>	101
4.1.9	<i>Sustainable Development (Indikator 2 Community Based Ecotourim Menurut Suansri)</i>	106
4.1.10	<i>Sumber dana dan Kontrol Sumberdaya (Indikator 3 Community Based Ecotourism menurut Suansri)</i>	109
4.1.11	<i>Konservasi alam dan budaya Sepakung</i>	111
4.1.12	<i>Faktor penghambat dan pendukung dalam optimalisasi ekowisata berbasis kearifan lokal</i>	113
4.2	Pembahasan	115
4.2.1	<i>Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sepakung</i>	116
4.2.2	<i>Optimalisasi Sumber daya Desa Sepakung (Indikator 1 Community Based Ecotourism Menurut Suansri)</i>	119
4.2.3	<i>Sustainable Tourism (Indikator 2 Community Based Ecotourim Menurut Suansri)</i>	

<i>4.2.4 Kontrol Sumber Dana dan Kontrol Sumber Daya (Indikator 3 Community Based Ecotourism)</i>	124
<i>4.2.5 Konservasi alam dan Budaya Sepakung (Indikator Community Based Ecotourim menurut Suansri)</i>	126
<i>4.2.6 Faktor penghambat dan pendukung optimalisasi ekowisata Sepakung (indikator Community based Ecotourism menurut Suansri)</i>	128
<i>4.2.7 Kesejahteraan masyarakat Sepakung (Indikator Community Based Ecotourism menurut Suansri)</i>	131
BAB V	135
PENUTUP	135
5.1 Kesimpulan	135
5.2 Saran	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pandangan tentang pemberdayaan masyarakat.....	13
Tabel 2. 2 Topologi Variabel kinerja Optimalisasi.....	23
Tabel 2. 3 Arahana rencana ekowisata.....	45
Tabel 4. 1 Luas wilayah.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat	15
Gambar 2. 2 Proses Optimalisasi menurut Purwanto & Sulistyastuti	21
Gambar 2. 3 Model Optimalisasi menurut G. C. Edward III	22
Gambar 2. 4 Pasar wisata	43
Gambar 2. 5 Gambar bagan pembangunan kesejahteraan sosial	55
Gambar 2. 6 Fokus Pembangunan kesejahteraan sosial	58
Gambar 2. 7 Kerangka Berfikir	65
Gambar 3. 1 Skema Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) Menurut Cecep Suhendra	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin penelitian.....	142
Lampiran 2 Surat keterangan penelitian	143
Lampiran 3 Surat Penetapan Doses Pembimbing	144
Lampiran 4 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	145
Lampiran 5 Pedoman Observasi	146
Lampiran 6 Pedoman Dokumentasi.....	147
Lampiran 7 Catatan Wawancara Ketua Pokdarwis.....	148
Lampiran 8 Catatan Wawancara Pengelola Wisata	158
Lampiran 9 Catatan Wawancara Kepala Desa.....	168
Lampiran 10 Catatan wawancara masyarakat Desa.....	174
Lampiran 11 Catatan wawancara pedagang.....	178
Lampiran 12 Catatan wawancara operator wahana	181
Lampiran 13 Catatan Wawancara Wisatawan	184
Lampiran 14 Anggaran Rumah Tangga Desa Wisata Sepakung	190
Lampiran 15 Dokumentasi.....	196

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah yang tertinggal merupakan salah satu upaya terencana untuk mengubah suatu daerah/desa dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik. Daerah dapat menjadi maju dengan komunitas yang berkualitas hidupnya sama dan tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah lainya. Jawa tengah merupakan salah satu provinsi sedang bergerak mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka pengentasan daerah tertinggal. Visi mewujudkan desa mandiri Jawa Tengah terus menggenjot pembangunan daerah dan melakukan desentralisasi ekonomi dari pusat ke daerah Jawa Tengah yang memberikan kesempatan sebesar besarnya kepada daerah untuk mengembangkan potensinya. Pusat kegiatan ekonomi yang tadinya berada dalam kota kota tertentu, kini mulai tersebar ke berbagai daerah dengan masing masing komoditas yang khas. Salah satu desentralisasi ekonomi wilayah Jawa Tengah terletak pada Kabupaten Semarang ditandai dengan banyaknya industri.

Kabupaten Semarang merupakan Kabupaten yang terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 981,95 Km² dengan populasi pada tahun 2016 sebanyak 1.014.198 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,51%. Kemiskinan merupakan dimana situasi serba kekurangan tidak bisa di hindari oleh seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya banyak kendala yang di hadapi dalam pembangunan diantaranya dari total penduduknya

sebanyak 46,5% merupakan penduduk belum bekerja / tidak bekerja dan mayoritas penduduk Kabupaten Semarang yang bekerja pada sektor pertanian namun sumbangan untuk sektor pertanian terhadap PDRB hanya sebesar 14,3% menandakan belum optimalnya kesejahteraan masyarakat dan produktivitas Pertanian di Kabupaten Semarang (BPS 2015). Persebaran tersebut ada di beberapa Kecamatan salah satunya Kecamatan Banyubiru berdasarkan data Badan Pusat Statistika di Kecamatan Banyubiru keluarga pra-sejahtera mencapai 13.940 pada tahun 2016 dari seluruh warga Kecamatan Banyubiru yang berjumlah 42.681(BPS,2017). Mayoritas persebaran keluarga pra-sejahtera di wilayah Banyubiru meliputi beberapa Desa yang jauh dari pusat Kota. Masyarakat di pedesaan tersebut bergantung pada hasil alam yang mereka kelola.

Mayoritas roda perekonomian ada di desa, dimana masyarakat desa kebanyakan bekerja sebagai petani atau buruh tani yang ada di desa dengan keterbatasan SDM dan keahlian. Masyarakat desa di era saat ini tidak bisa mengandalkan hasil pertaniannya saja karena beberapa faktor yaitu gagal panen, keterbatasan modal, dan hasil pertanian yang kurang maksimal menjadikan masyarakat desa sangat rentan terhadap kemiskinan. Pendidikan rendah dan minimnya keahlian selain bertani menjadikan salah satu faktor kemiskinan yang dirasakan masyarakat desa. Sebagai pemeran penting dalam rantai perekonomian, seharusnya masyarakat desa bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa memberikan nilai tawar tinggi dan meningkatkan kesejahteraannya, akan tetapi dalam realitanya kemiskinan, pengangguran dan

minimnya peluang usaha di desa memberikan dampak signifikan pada minimnya kesejahteraan yang didapat mereka di desa. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus mereka tutup dengan bekerja sambil tidak bisa mengandalkan hasil olahan mereka saja.

Pemberdayaan merupakan proses masyarakat, yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan mendapat dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat membentuk individu mandiri berdaya dan memiliki pemahaman, sikap, ketrampilan, dan perilaku yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardikanto dan Soebinto, 2013).

Upaya meningkatkan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Semarang menerapkan (INTANPARI) atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia potensi lokal salah satunya dengan mengembangkan potensi desa, dimana potensi desa yang dikembangkan bukan hanya terkait tentang pertanian akan tetapi ada juga potensi desa melalui pengembangan desa wisata yang bisa menjadi bahan untuk memberikan kesejahteraan kepada warga yang mengelola desa wisata tersebut. Desa wisata bisa menjadi salah satu garda dalam meningkatkan roda perekonomian yang ada di desa dengan mengelola, memanfaatkan kekayaan alam yang ada di desa menjadikan salah satu solusi untuk mensejahterakan masyarakat. Peningkatan pengolahan desa wisata bukan hanya terkait tentang kekayaan alam nya saja akan tetapi bisa tentang SDM yang bisa mengolah, manajemen yang baik, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada. Harapannya dengan mengelola desa wisata masyarakat sekitar mampu merasakan dampak serta peningkatan perekonomian. Beberapa program untuk menangani permasalahan tersebut yaitu salah satunya dengan membentuk desa wisata dengan

melihat potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Salah satu yang didorong untuk menjadi desa wisata yaitu Desa Sepakung dengan potensi yang ada disana.

Desa Sepakung secara administratif memiliki luas wilayah 954,56 Ha, termasuk desa terluas yang ada di Kecamatan Banyubiru. Bisa dikatakan Desa Sepakung menjadi desa paling ujung selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang. Letak Desa Sepakung dikaki Gunung Telomoyo menjadikan desa ini memiliki karakter yang unik dengan demografinya disana. Jumlah masyarakat desa Sepakung 4551 (BPS,2017). Persebaran masyarakat miskin Desa Sepakung 30% dari total penduduk disana. Tingginya angka kemiskinan Desa Sepakung disebabkan karena jauhnya jarak ke pusat kota. Masyarakat Desa Sepakung kesulitan untuk menjual hasil bumi karena harus menempuh jarak sekitar 15 Km menuju ke pasar yang ada dekat pemerintahan Kecamatan Banyubiru. Wilayah Desa Sepakung yang berada pada ketinggian, berhawa sejuk serta pemandangan yang luarbiasa indah menjadisuatu potensi wisata yang menggiurkan. Masyarakat dengan pemangku kebijakan di desa bermusyawarah untuk mengolah potensi desa dengan memanfaatkan alam yang ada di desa Sepakung. Inisiatif tersebut disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Semarang untuk menjadikan Desa Sepakung sebagai desa wisata tertuang pada Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0424/2015 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang dimana didalam keputusan tersebut tercantum Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru sebagai desa wisata dengan katagori desa wisata potensial. Potensi di Sepakung adalah

panorama alam, kesenian lokal, dan budaya. Aspek wisata yang dikembangkan pertamakali yaitu panorama alam.

Desa Wisata Sepakung mengedepankan konsep ekowisata dimana konsep ini mengedepankan tentang konservasi alam yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Konsep wisata Sepakung yang mengedepankan kesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Konsep ekowisata merupakan strategi untuk memobilisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan pariwisata dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata serta melakukan konservasi alam.

Pertama kali dibuka destinasi wisata yaitu CemoroSewu. Dinamakan CemoroSewu karena tempat wisata tersebut awalnya bernama Bukit Cemoro Sewu dengan luas wilayahnya kurang lebih 7 Hektar. Fasilitas yang disediakan di tempat wisata Cemoro Sewu antara lain gardu pandang rawa pening, toilet, parkir, top selfie, dan warung. Objek wisata tersebut bekerja sama dengan Perhutani sebagai pemilikan negara yang bersistem bagi hasil antar pengelola dengan Perhutani. Pertama kali pengembangannya dengan mengedepankan panorama alam ekowisata Sepakung perlahan mulai berkembang dengan banyaknya dibuka wisata baru. Wisata berikutnya yaitu Air Terjun Goa Semar yang terletak di Dusun Srandil.

Pengembangan destinasi wisata ekowisata berbasis kearifan lokal diharapkan mampu mengerakkan ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja pada sektor pariwisata. Penerapan Ekowisata berbasis kearifan lokal Desa Wisata Sepakung

belum secara maksimal mampu menghubungkan pariwisata dengan pengembangan masyarakat. Hal ini terbukti belum adanya wadah di desa wisata untuk menampung karya atau produk dari masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat mengembangkan wirausaha yang dimilikinya dan hanya mengandalkan pendapatan dari desa wisata. Desa wisata kurang berinovasi dalam pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat. Seharusnya desa wisata yang menerapkan Ekowisata berbasis kearifan local dapat melibatkan masyarakat secara menyeluruh sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak dari desa wisata itu sendiri serta bisa menjaga alam dengan konservasi pohon atau tempat wisata yang di kelola. Pada Desa Wisata Sepakung penerapan Ekowisata berbasis kearifan lokal ini belum berjalan secara maksimal yang terlihat dari keikutsertaan warga dalam mengelola ekowisata dimana belum semua warga Sepakung bergabung dengan Pokdawis. Tak jarang pemerataan tamu desa wisata yang mengalami kesenjangan sehingga terjadi konflik antar desa wisata dan masyarakat. Kendala dalam pengembangan Desa Wisata Sepakung adalah dana yang mengandalkan dari dana hasil tiket tempat wisata saja sehingga pengembangan desa wisata tidak dapat berjalan secara maksimal tentunya harus bertahap menyesuaikan dana yang ada.

Dilihat dari pemasaran Desa Wisata Sepakung cukup maksimal. Hal ini dapat terlihat dari website Desa Wisata Sepakung yang terkelola dengan baik. Melalui pembagian jobdesk dalam memegang akun sosmed dan website menjadikan Desa Wisata Sepakung sekarang banyak di lirik oleh wisatawan, akan tetapi masih ada

beberapa kekurangan untuk pengelolaan Desa Wisata Sepakung. Akses internet di wilayah tersebut mengandalkan jaringan wifi karena sinyal seluler cukup sulit, dan tidak semua tempat menyediakan wifi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan mengkaji tentang pengembangan Desa Wisata dengan judul

“Optimalisasi ekowisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi peningkatan kesejahteraan di Desa Wista Sepakung, Banyubiru, Kab. Semarang Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana optimalisasi pengembangan ekowisata berbasis kearifan local di Desa Wisata Sepakung?
- 1.2.2 Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Optimalisasi Pengembangan Ekowisata berbasis Kearifan local ?
- 1.2.3 Bagaimana kesejahteraan masyarakat desa wisata sepakung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

- 1.3.1 Mendeskripsikan Optimalisasi pengembangan ekowisata berbasis kearifan local di Desa Wisata Sepakung.

1.3.2 Mendeskripsikan permasalahan yang menghambat dalam pengimplementasian ekowisata berbasis kearifan local dan mengetahui faktor pendukung dalam penerapan ekowisata berbasis kearifan lokal.

1.3.3 Mendeskripsikan kesejahteraan masyarakat desa wisata Sepakung

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu untuk memberikan ilmu serta wawasan di bidang pemberdayaan masyarakat berbasis Desa wisata dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya, selain itu penulis juga berharap dari penelitian ini dapat menambah kajian tentang pemberdayaan masyarakat berbasis Desa wisata penelitian ini menjadi referensi perpustakaan, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memahami tentang pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata tentang pengelolaan Ekowisata berbasis kearifan local yang dapat memahami pengelolaan berbasis masyarakat dengan baik.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dalam kehidupan yang praktis.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mempelajari tentang pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemberdayaan

Empowerment/pemberdayaan merupakan konsep dari bagian perkembangan alam pikiran dan kebudayaan yang lahir dari masyarakat Barat, terutama Eropa.

Pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat menurut, Ife (1995) :

“Empowerment is process an help disadvantaged groups dan individu to complete more effectively with other interests by helping them to learn and use lobbying, use the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on”.

Konsep pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai upaya memberikan wewenang, otonomi dan kepercayaan kepada setiap individu dalam konteks ini masyarakat dalam suatu organisasi atau komunitas, serta mendorong mereka untuk kreatif agar bisa menyelesaikan tugas / kewajibanya secara baik. Dala teori Paul (1987) dalam Prijono dan Pinarka (1996), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran untuk berpolitik dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses serta hasil-hasil dari pembangunan”.

Konsep pemberdayaan masyarakat memiliki dua cara pandang yaitu kaum pendukung pembangunan (developmentalisme) dengan kelompok anti-developmentalisme dimana pemikiran dan pemaknaan yang berbeda tentang konsep pemberdayaan. Dimana ada konsep community development dengan strateginya community empowerment. Dengan penentangan konsep ini oleh kelompok anti-

development. Konsep pemberdayaan masyarakat dari kelompok pendukung aliran development Adam dari kamus Pekerjaan Sosial: “the user participation in service and to selfup move generally in which group take action on their own behalf, either cooperation with or independenly of, the statutory service”. Adam mengartikan tentang pemberdayaan sebaga alat untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat supaya mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidupnya. Sedikit berbeda dengan Wrihatnolo & Nugroho yang menjelaskan konsep pemberdayaan mencakup (community development) pembangunan masyarakat dan (community based development) pembangunan berbasis masyarakat. Dimana pemberdayaan bisa dikatakan adil dimana pembagian kekuasaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa memperoleh akses terhadap sumber daya. Sasaran dari pemberdayaan yaitu dari korban pembangunan menjadi pelaku pembangunan. Namun teori ini di tentang oleh kelompok kedua (anti-developmentalisme) yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: Menurut John Friedman dalam Eka (2018) “Pemberdayaan sebagai *alternative development*, yang memberikan ‘*inclusive democracy*’, *appropriate economic growth, gender equallity and intergenerational equaty*”. Jim Ife (1995) ‘memberikan pandangan tentang pemberdayaan kedalam kelompok: pertama, penganut structural memaknai pemberdayaan sebagai upaya tranforasi untuk mengupayakan fundamental, eliminasi structural/ system yang operatif: kedua, Kelompok pluralism memandang pemberdayaan untuk upaya meningkatkan daya individu atau kelompok untuk dapat bersaing dengan kelompok

lain dalam suatu ‘rule of the game’ tertentu: Ketiga, Kelompok elitis, dimana pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit (pemangku kebijakan), untuk membuat kebijakan, membuat suatu kelompok atau aliansi, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktik dan struktur yang elit: keempat, upaya mengubah diskursus serta menghargai subyek dalam pemahaman realitas sosial’.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh ‘anti-developmentalisme’ menjelaskan tentang pemberdayaan sebagai upaya pembebasan dari ‘determinisme’ dan kekuasaan absolut, serta mendasarkan pada aktualisasi dan keaktualisasian eksistensi manusia serta kemanusiaan, bertujuan menciptakan kehidupan manusia yang adil dan beradab. Pemberdayaan merupakan istilah yang tidak netral, namun memiliki keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat grass-root dalam system dominan subordinat. Perbedaan yang kelihatan antara kedua aliran itu, dengan aliran pertama yang menekankan tentang perubahan manusia agar bisa menyesuaikan dengan system, sedangkan aliran kedua menekankan tentang perubahan system dan struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lebih adil dan beradab dengan masyarakat yang akan berdaya dari determinisme. Penjelasan terkait perbedaan antara dua aliran yang memiliki sudut pandang sendiri tentang pemberdayaan masyarakat yang di usung oleh kelompok pendukung developmentalisme & kelompok yang anti-developmentalisme tersaji dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Pandangan tentang pemberdayaan masyarakat

Konsep Pemberdayaan	Developmentalisme	Anti-Developmentalisme
Definisi	Konsentrasi dengan kekuatan; kesadaran politik; Memperbesar akses terhadap proses dan hasil pembangunan (partisipasi)	Upaya membebaskan dari determinisme dan (power) kekuatan yang absolut
Sasaran	Merubah korban (masyarakat) menjadi pelaku (actor) pembangunan; meningkatkan partisipasi masyarakat	Menciptakan system dan struktur ekonomi, politik, dan budaya yang adil
Strategi	People Centered Development, Community Based Development; Community Driven Development	Conscientization, Education Popular
Program	Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaringan pengaman sosial (JPS), Program Kemitraan	Pendidikan penyadaran untuk menciptakan system ekonomi alternative
Indikator	Kemandirian dan Partisipasi	Kesadaran kritis terkait terciptanya struktur politik tanpa represi, tanpa eksploitasi dan budaya tanpa hegemoni

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial, yang bersifat "people centred, participatory, sustainable, dan emprowing" (Chamber, 1995 pada Jurnal Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (2015).

Kesimpulan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat untuk diperdayakan, dimana masyarakat ditingkatkan harkat dan martabat berbagai lapisan masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan dirinya sendiri dari ketidakberdayaan dan kemiskinan. Pemberdayaan tidak lepas dari memandirikan masyarakat dimana masyarakat yang tertinggal dan terbelenggu dengan kemiskinan diberdayakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.2 Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan mengandung dua arti, pertama proses pemberdayaan yang menekankan tentang proses melakukan atau memberikan sebagai kekuatan (power), kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat individu untuk lebih berdaya. Kedua yaitu menekankan tentang proses menstimulasi untuk mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya Pranarka & Vidhyandika (1996). Sedikit berbeda dengan Rappaport (1984) yang menjelaskan proses dimana masyarakat menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap ketrampilannya. Penekanan bahwa masyarakat memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup dalam mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain.

Sumadrjo (1999) yang dikutip dalam Andini (2013:175) menjelaskan ciri-ciri warga masyarakat yang berdaya yaitu:

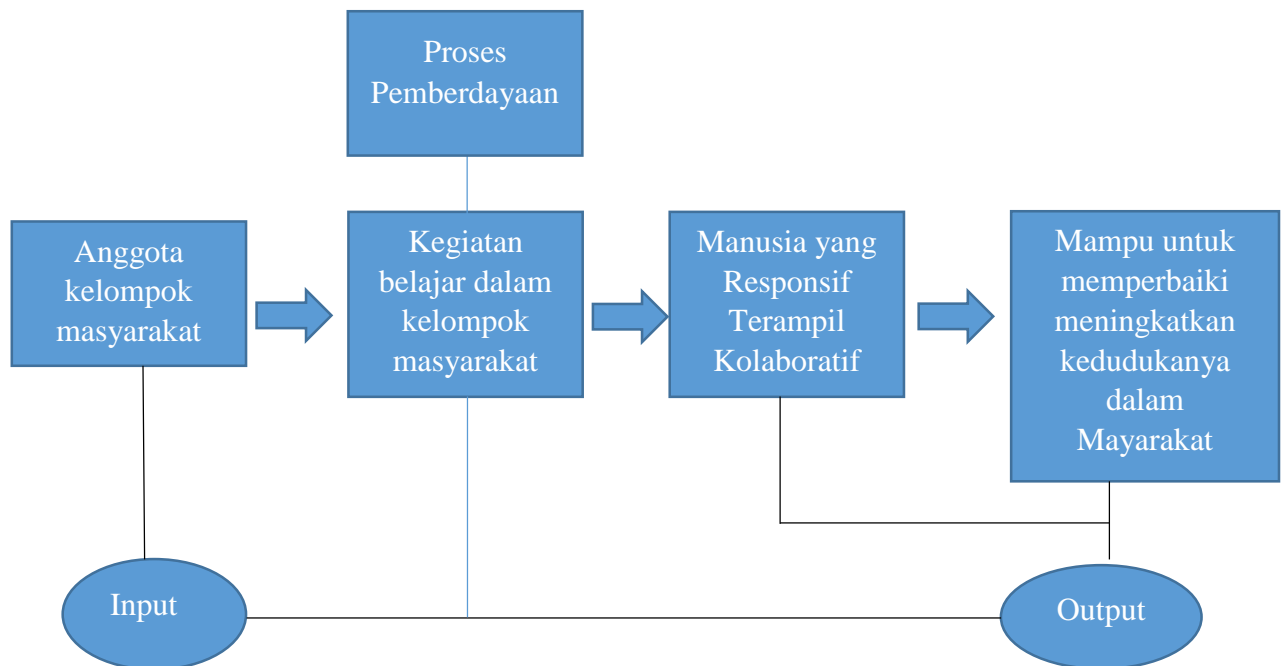
- a) Mampu memahami diri dan potensi, mampu merencanakan (melakukan antisipasi terkait kondisi perubahan ke depan)
- b) Mampu mengembangkan diri sendiri
- c) Memiliki kekuatan dalam berunding
- d) Memiliki power memadai dalam kerjasama yang saling menguntungkan
- e) Bertanggung jawab terkait tindakanya

Slamet (2003) yang dikutip dalam Mulyono (2015) menjelaskan terkait masyarakat yang berdaya dimana masyarakat itu tahu dan mengerti, paham untuk termotivasi, bisa

memanfaatkan peluang, berenergi, bisa bekerjasama, bisa mencari solusi alternative, mampu mengambil resiko yang dibuat, mampu mengambil keputusan dan bisa mencari informasi yang mampu bertindak sesuai dengan situasi. Upaya memberdayakan masyarakat menurut Sumodiningrat, Gunawan (1999) terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Bisa menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang(enabling),
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering)
- 3) Melakukan perlindungan terkait persaingan yang tidak seimbang antara eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Proses pemberdayaan masyarakat tersaji pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Proses pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat

Pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu tentang masyarakat tidak dijadikan objek dari proses pemberdayaan akan tetapi sebagai subyek (actor) dalam pembangunan itu sendiri, dimana pendekatan ini menurut Sumodiningrat, Gunawan (1999) yang menjelaskan bahwa:

- 1) upaya pendekatan harus terarah, dimana ada keberpihakan ke masyarakat. Upaya yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan program dirancang agar bisa mengatasi masalahnya sesuai kebutuhan. Program harus mengikutsertakan masyarakat untuk dibantu menuju sasaran.
- 2) Mengikutsertakan masyarakat agar terbantu dalam mencapai tujuannya, yaitu dengan bantuan program yang efektif sesuai kehendakan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengalamannya merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan peningkatan diri sendiri dan ekonominya.
- 3) Pendekatan kelompok, dalam konteks ini tidak bisa dipecahkan sendiri-sendiri. Pendekatan ini diharapkan bisa memecahkan masalah untuk memanfaatkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

2.3 Indikator Pemberdayaan

Schuler, Hashemi dan Riley menjelaskan ada beberapa indikator dalam pemberdayaan (Empowerment index) atau indeks pemberdayaan Nicolie (2015):

- 1) Kebebasan dalam mobilitas sehari-hari
- 2) Kemampuan dalam memenuhi komoditas 'kecil'

- 3) Kemampuan dalam memenuhi komoditas 'besar'
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan diri sendiri maupun kelompok
- 5) Kebebasan yang relative dalam masyarakat
- 6) Kesadaran hukum dan politik
- 7) Keterlibatan dalam musyawarah
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi dala pembangunan

2.4 Partisipasi

Partisipasi salah satu komponen penting dalam pembangkitan kemandirian & proses pemberdayaan masyarakat Craig & May, (1995) dikutip Wulandari, Putri (2018) “ahwa pemberdayaan & partisipasi menjadi strategi potensial untuk meningkatkan kesejahteraan dalam konteks ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini yang menciptakan pembangunan berpusat pada masyarakat”.

Partisipasi menurut Hoofsteede (1971) dikutip oleh Eka (2018) (menjelaskan bahwa “*the taking part in one or more phases of the process*” atau pengambilan bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu tahap itu sendiri(proses pembangunan. Sedikit berbeda yang di utarakan Fithriadi, dkk (1997) “Partisipasi merupakan pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan berkesinambungan dalam proses interaktif dan berlanjut”.

Prinsip partisipasi dengan melibatkan/peran serta masyarakat secara langsung, konteks ini menjadikan masyarakat ikut ambil bagian dalam proses dari awal seperti perumusan hingga tahap akhir/ hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjamin suatu

proses yang baik dan benar, Abe (2002) yang dikutip oleh Norhafiza(2017) mengasumsikan hal ini yang menyebabkan masyarakat terlatih secara baik. Dimana masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting tentang: (1) Terhindar dari manipulasi, Masyarakat hadir untuk memperjelas apa yang sebenarnya ingin di kehendaki oleh masyarakat itu sendiri. (2) Memberikan nilai pada legitimasi terkait perumusan perencanaan dalam konteks ini semakin banyak jumlah mereka yang terlibat maka akan semakin baik pula tingkat partisipasinya (3) Meningkatkan kesadaran dan ketrampilan pada masyarakat dalam berpolitik. Partisipasi merupakan ikut berperan dan aktif dalam suatu kegiatan dimana keterlibatan dan ikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam proses kegiatan bersangkutan.

Dalam konteks pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai aktor/pelaku utama dalam pembangunan desa, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Masyarakat ikut ambil bagian dalam pengambil keputusan, penyusunan dan pelaksanaan program-program yang telah dirancang bersama untuk pembangunan. Penguatan peran masyarakat dan tatanan aparature pemerintah yang baik(Good governance), yang menyelenggarakan dengan prinsip prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan keadilan dan memanfaatkan potensi dan budaya desa. Konsep pembangunan masyarakat yang partisipatif memiliki tiga unsur yaitu: (1) peningkatan peran masyarakat terkait perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (2) Orientasi terkait pemahaman

masyarakat dalam konsep pembangunan(3) Peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

Partisipasi mendorong masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat terwujud atas tumbuhnya rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Rasa percaya akan tumbuh karena masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan setara (*equal*). Pembangunan yang partisipatif diharapkan dapat : (1) bisa mewujudkan visi masa depan yang ingin masyarakat wujudkan, (2) Menghimpun sumber-sumber masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, (3) Berperan dalam perencanaan kedepan tanpa menyerahkan pada kelompok ahli/kelompok berkuasa,(4) Mampu berfikir kritis dalam mengidentifikasi bidang bdang permasalahan untuk menilai lingkungan ekonomi sosial yang perlu di perbaiki, (5) Memperoleh pengalaman dalam menganalisa situasi dan identifikasi strategi yang tepat dalam kehidupan yang baik,(6) Berpikir individual dalam bekerja atas kebersamaan, (7) Masyarakat dan desa menyelesaikan program swadaya untuk menuju ketidak tergantungan terhadap program pemerintah menuju masyarakat mandiri,(8) Proses yang dibangun menjadikan hubungan antar lini yang erat dan kebersamaan antar masyarakat(P3P Unram,2001).

2.5 Kelembagaan dan Kelompok

Istilah kelembagaan ‘(social institusion)’ bisa disamakan dengan “organisasi” (social organizer) dimana dalam Uphoff (1986) dalam jurnal Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (2012) menjelaskan tentang kelembagaan:

“What constitutes an institution is an subject of countinuing debate amos social scantiest....The arm institution and organizing are commonly use interchange and this contributes to ambigration confuse”

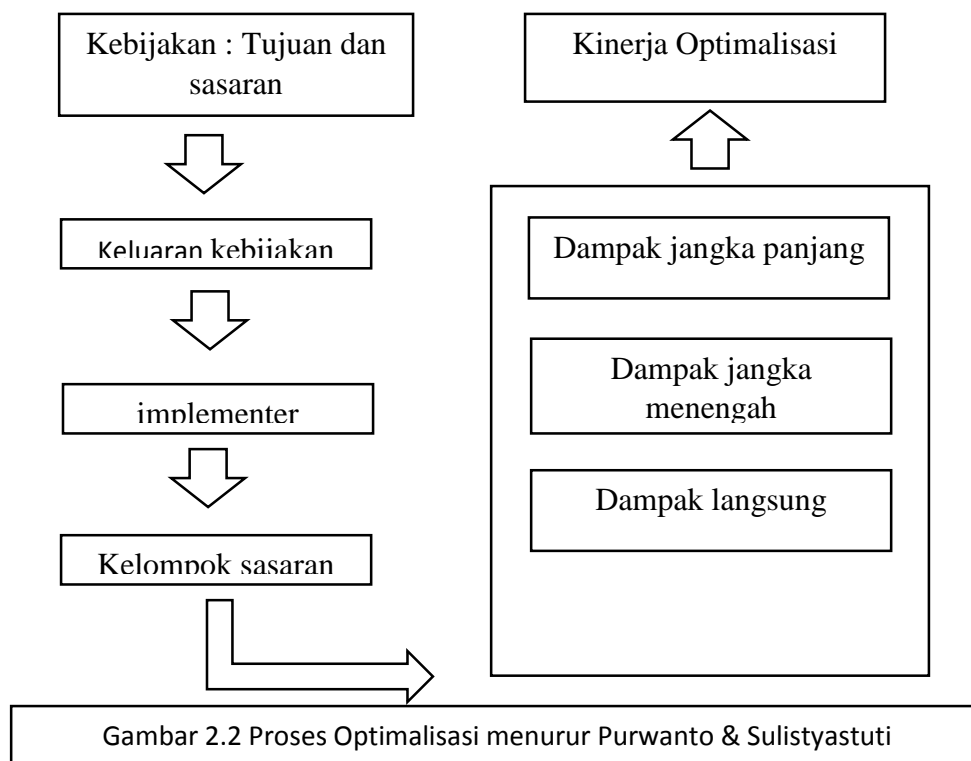
Menurut Koentjaraningrat (1997) yang mengemukakan bahwa terkait pranata ataupun bangunan sosial yang menjelaskan bahwa a\kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang melakukan interaksi yang secara terus menerus dan mempunyai tujuan bersama. Sedikit berbeda dengan pendapat DeVito (1997) yang menjelaskan terkait kelompok merupakan kumpulan-kumpulan individu yang saling berkomunikasi secara mudah dan berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi tujuan yang sama.

Kelompok menjadi wadah dalam implementasi pemberdayaan masyarakat desa. Konsep Ife (1995) pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan pihak-pihak yang belum beruntung(masyarakat miskin), dapat dilakukan melalui inisiasi,perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sampai memperoleh hasil. Dalam proses pemberdayaan harus ada sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah guna melakukan sinergitas antara dua lini. Sinergitas dalam pembangunan tidak jauh dari masyarakat dengan pemangku kebijakan dimana serap

aspirasi, harus sejalan dengan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat. Kelembagaan (pemerintah daerah) dan Kelompok (masyarakat desa) harus bisa saling bahu membahu dalam pembangunan. Pencapaian tujuan tidak akan lepas dari hubungan ini. Pertumbuhan, partisipasi, kesadaran dan kemajuan dalam pembangunan harus bisa melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah desa.

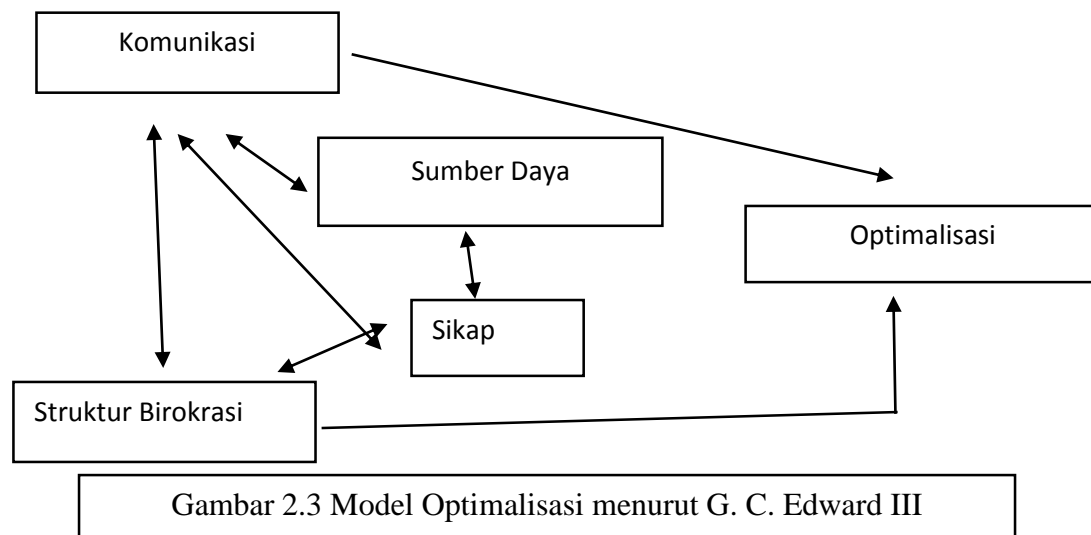
2.6 Proses Optimalisasi

Proses Optimalisasi berangkat dari suatu kebijakan atau program. Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dan realita. (Purwanto&Sulityastuti,2012:65). Proses optimalisasi ada gambar dibawah:



2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Optimalisasi

Proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Menurut George C Edward dalam Subarsono (2005:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi (sikap), 4. Struktur birokrasi dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana tersaji pada Gambar 2.3 berikut ini :



Pendapat Rondinelli dan Cheema (Purwanto&Sulityastuti,2012:101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu:

1. Kondisi lingkungan.(*enviromental conditions*)
2. Hubungan antar organisasi.(*inter-organizational relationship*)
3. Sumberdaya.(*resources*)

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. (*characteristic implementing agencies*)

Topologi Variabel kinerja Optimalisasi menurut beberapa ahli tersaji dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Topologi Variabel kinerja Optimalisasi

Cheema & Rondelli	Van Metter & Van Horn	Scheirer
Kondisi lingkungan	Kondisi lingkungan	Hubungan dengan lingkungan
Hubungan antar organisasi	Komunikasi antar organisasi	Aliran komunikasi
Sumberdaya	Sumberdaya	Sumberdaya
Karakteristik agen pelaksana	Pelaksana	Ketrampilan pelaku
	Standar dan sasaran kebijakan	Peraturan kelompok
		Rutinitas
		Pengawasan tujuan
		Pengambilan keputusan dan control
		Insentif
		Dukungan kognitif

Maka dari topologi diatas dpat disimpulkan apabila kinerja optimalisasi dipengaruhi bebrapa faktor yaitu: komunikasi, sumberdaya, organisasi, lingkungan (struktur birokrasi), dan agen pelaksana dan standar dan sasaran kebijakan.

2.7.1 Komunikasi

Menurut Achmad S. Ruky dalam Riswandi (2008), komunikasi merupakan proses dimana pertukaran pesan dimana pesan ini bisa berupa gagasan, perasaan dan fakta dari informan kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan/ atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut.

Berbeda dengan pendapat Bernard Berelson dan Gary A dalam (Mulyana 2014:10) “komunikasi merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, ketrampilan, dan sebagainya. Hal yang ditransmisikan ini dapat berupa simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik dan sebagainya”.

Sedangkan Lasswell dalam (Riswandi 2008:3) menjelaskan tentang lima komponen yang terlibat dalam komunikasi,yaitu:

1. Siapa (pelaku komunikasi pertama yang mempunyai inisiatif atau sumber).
2. Mengatakan apa (isi informasi yang disampaikan)
3. Kepada siapa (pelaku komunikasi lainnya yang dijadikan sasaran penerima)
4. Melalui saluran apa (alat/saluran penyampaian informasi).
5. Dengan akibat/hasil apa (hasil yang terjadi pada diri penerima).

Dikaitkan dengan Optimalisasi, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah:

1. Kebersamaan dan keterbukaan antar lini masyarakat desa wisata sepakung
2. Pendistribusian pendapatan pariwisata.
3. Kesenambungan antara pengelola dengan masyarakat Desa Wisata Sepakung

2.7.2 Sumber Daya

Menurut Pitana&Diarta (2009) sumber daya merupakan bagian dari alam yang bersifat netral sampai adanya keterlibatan manusia dari luar untuk mengelola agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Sumberdaya tersebut bisa berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya yang mendukung pariwisata yaitu antara lain : sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya dan sumber daya minat khusus.

Sumber daya pariwisata adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Piatna&Diarta,2009:68) sumber daya yang ada di pariwisata antara lain:

a. Sumber daya alam

Menurut Damanik dan Weber (2006:2), sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah :Keajaiban dan keindahan alam (topografi),Keragaman flora,Keragaman fauna,Kehidupan satwa liar,Vegetasi alam

b. Sumberdaya manusia

Damanik dan Weber dalam (2006:2) memberikan Sumber daya manusia sebagai salah satu hal terpenting dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap dan elemen memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakannya. Faktor sumber daya manusia-lah yang sangat menentukan pengembangan pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, sikap dan kemampuan staff akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan, kepuasan dan kesan atas kegiatan wisata yang dilakukannya.

c. Sumberdaya budaya

Menurut (Piatna&Diarta,2009:68) sumber daya budaya yang dapat dijadikan daya Tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bangunan bersejarah, situs, monument, museum, galeri seni, situs budaya, kuno dan sebagainya.
2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industry film, dan penerbit dan sebagainya.
3. Seni pertunjukkan, drama, sendra tari, lagu daerah, teater jalanan, eksbisi foto festival, dan even khusus lainnya.
4. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya.

d. Sumberdaya minat khusus

Menurut Piatna&Diarta (2009) pariwisata dengan minat khusus menjadi salah satu alternatif yang akan menjadi trend kedepan. Jenis-jenis sumber daya pariwisata minat

khusus antara lain: petualangan aktif, nature and wildlife, affinity, romance, family, soft adventure, history, hobby, spiritual, and sports.

Dikaitkan dengan penelitian ini maka fenomena yang akan dilihat dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi optimalisasi ekowisata adalah:

1. Kemampuan sumberdaya manusia dalam mengoptimalkan pemanfaatan SDA.
2. Pariwisata berbasis konservasi alam.
3. Pengembangan Budaya untuk pariwisata
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata.

2.7.3 Struktur Birokrasi

Menurut Michael G. Roskin dalam (Soekanto, 1982:293) birokrasi merupakan organisasi yang terbagi atas para pemangku diberi amanah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang direncanakan oleh para pembuat keputusan. Suatu terstruktur atau sistem rasional terorganisir terancang dengan baik untuk memberikan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efisien dan efektif. Selain itu Birokrasi biasa disebut sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Menurut Max Weber dalam (Soekanto, 1982:294) bahwa birokrasi mencakup lima unsur, yaitu:

1. Organisasi
2. Pengerahan tenaga
3. Sifatnya yang teratur
4. Bersifat terus menerus

5. Mempunyai tujuan

Berkaitan dengan penelitian yang dikaji, maka fenomena yang dipergunakan dalam mengukur struktur birokrasi adalah:

1. Pembentukan pokdawis dan struktur organisasi yang solid
2. Pembagian tujuan yang jelas dan terintegrasi
3. Koordinasi sesuai dengan jobdesk dan saling membantu

2.7.4 Lingkungan

Menurut Robbins (2003:608) mengungkapkan bahwa lingkungan tidak pernah kehilangan definisi. Misalnya definisi yang paling populer, mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan sangat mempengaruhi suatu pengembangan pariwisata. Bagaimana kondisi lingkungan dan potensinya dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pengelolaan pariwisata. Kondisi lingkungan dan sosio kultural yang ada disuatu desa wisata dan bagaimana mengelolanya sehingga menjadi satu kesatuan yang baik. Kapasitas lingkungan mengacu sampai tingkat mana lingkungan itu mendukung adanya pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan tumbuh akan menghasilkan sumberdaya yang berlebih. Berkaitan dengan penelitian yang dikaji, maka fenomena yang dipergunakan dalam mengukur struktur birokrasi adalah:

1. Sosio kultural yang ada di sepakung
2. Adanya aturan atau adat istiadat setempat.

3. Pembelajaran dalam pengembangan pariwisata antara tuan rumah dan wisatawan.
4. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata

2.8 Faktor keberhasilan atau kegagalan Optimalisasi

Sedangkan menurut Sabatier (Purwanto&Sulityastuti,2012:19-20) mengemukakan bahwa dalam optimalisasi ada 6 variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan optimalisasi, yaitu:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
- e. Dukungan para *stakeholder*.
- f. Stabilitas kondisi social, ekonomi, dan politik.

Berbeda dengan Schneider dalam (Purwanto&Sulityastuti,2012:19-20) menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu;

- a. Kelangusngan hidup (*viability*)
- b. Integritas teori (*teoritical integrity*)
- c. Cakupan (*scope*)
- d. Kapasitas (*capacity*)
- e. Konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*)

Sedangkan keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980) dalam (AG, Subarsono, 2005 : 93) mengungkapkan bahwa keberhasilan Optimalisasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan optimalisasi (*context of optimization*). Pada variabel isi kebijakan mencakup : 1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan, 2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, 3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan kebijakan. Dan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, 3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.9 Pariwisata

2.9.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi besar bagi suatu daerah atau Negara peningkatan devisa sangat di harapkan oleh Negara karena dengan pariwisata sangat membantu Negara dalam pemasukan devisa. Selain itu dengan adanya pariwisata bisa memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengentaskan pengangguran selain untuk mengetahui lebih lanjut, berikut beberapa definisi pariwisata yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

WTO mendefinisikan pariwisata sebagai “*the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes*” atau berbagai aktivitas yang

dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain. (Muljadi. 2009: 9)

Sedikit berbeda dengan definisi pariwisata menurut Fennel pada buku (Pitana&Diarata:2009:45) adalah *“Tourism is defined as the interrelated system that includes tourists and the associated services that are provided and utilised (facilities, attractions, transportations, and accomodation) to aid in their movement”*

Berbeda lagi dengan pendapat (Pitana&Diarta:2009:54) dalam buku ‘Pengantar Ilmu Pariwisata bahwa pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya (residen) sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya tetapi tidak mendapat upah/gaji dari perjalanannya tersebut’.

Menurut Muljadi (2009:7) Pariwisata adalah suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Selain itu, pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.

Pendapat Mathieson & Wall Dalam buku (Suwena, 2010: 30) Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya,

aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya.

Sedangkan definisi pariwisata pada buku dasar dasar pariwisata Suwanto(2004) yaitu suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya untuk

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan wisatawan, dan penyedia layanan dengan disuguhkan berbagai kegiatan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah daerah. Berdasarkan kepentingan nasional, menurut Departement Kebudayaan dan Pariwisata RI dalam (Utama,2014:6-8) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok, sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Penghapusan kemiskinan.
3. Pembangunan berkesinambungan.
4. Pelestarian budaya.
5. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia.
6. Peningkatan ekonomi dan industri.
7. Pengembangan tekhnologi.

2.9.2 Dampak Pariwisata

a. Dampak Ekonomi

IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) yang dikutip oleh Spillane (1995) di dalam buku pengetahuan dasar ilmu pariwisata (Suwena, 2017 : 165) pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini: (1) Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun international; (2) Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya; (3) Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi; (4) Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi; (5) Penghasil devisa; (6) Pemicu perdagangan international; (7) Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa *hospitality* yang handal dan santun, dan (8) Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi. Pada sisi yang berbeda, walaupun pariwisata telah diakui sebagai faktor penting stimulator penggerak perekonomian di beberapa negara di dunia, namun pariwisata juga menyembunyikan beberapa hal yang jarang diungkap dan dihitung sehingga sangat sulit untuk ditelusuri perannya atau kerugiannya. Berikut beberapa dampak positif dan negatif pariwisata terhadap perekonomian. Dampak Positif Pariwisata Terhadap Perekonomian

1. *Foreign Exchange Earnings*

Pengeluaran sektor pariwisata menjadikan perekonomian masyarakat local meningkat dan menjadi stimulus untuk berinvestasi serta menjadikan sector keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sector ekonomi lainnya. Pengalaman dari beberapa Negara peningkatan kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata akan meningkatkan bertumbuhnya bisnis valuta untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama berwisata.

2. Contributions To Government Revenues

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi. Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang di *import* dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.

3. Employment Generation

Pada negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, bahwa sektor pariwisata secara internasional akan berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir.

4. Infrastructure Development

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik,

telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat local itu sendiri sebagai tuan rumah.

5. Development of Local Economies

Pendapatan sektor pariwisata acapkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.

Segi positif dari kepariwisataan cukup banyak terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur Sosial sebagai akibat pengembangan pariwisata, akan terjadi :

- a) Transaksi kesempatan kerja dalam sektor pertanian ke sektor pelayanan wisata
- b) Modernisasi dalam cara-cara pertanian dan penjualan pasca panen
- c) Pemerataan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata yang akan dilakukan dalam pengorganisasian.
- d) Berkurangnya perbedaan jenjang dalam pendidikan dan kesempatan berusaha atau peluang pekerjaan.

2. Modernisasi Keluarga

- a) Kaum wanita memperoleh status baru, dari petani tradisional berubah menjadi pedagang kecil, pemilik toko cinderamata/oleh-oleh, restoran, atau bekerja pada kerajinan tangan dan karyawan hotel

- b) Terjadi kelonggaran perlakuan orang tua yang dilakuakn terhadap anak-anak, dari disiplin ketat menjadi anak yang bebas memilih sesuai dengan yang dicita-citakan.

3. Peningkatan dalam wawasan masyarakat

- a) Terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang positif, terutama dalam etiket dan cara berkomunikasi antarsesama

- b) Dapat menghilangkan prasangka-prasangka negatif terhadap etnis.

b. Dampak Lingkungan

Kutipan Ding dan Pilgram (1995) didalam buku pengetahuan dasar ilmu pariwisata (Suwena, 2017:175) mengemukakan, banyak bentuk dari kegiatan pariwisata mempunyai andil dalam menurunkan kondisi lingkungan dan cenderung merusak kegiatan pariwisata. sumber daya alam, perusakan terhadap lingkungan, kekacauan struktur sosial merupakan dampak dari indikatoindikatoryang tidak dikehendaki yang muncul dari gelombang wisatawan. Pernyataan Ding dan Pilgram tersebut cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa di beberapa tempat atraksi budaya menjadi daya tarik, kesenian, ritual keagamaan, peninggalan sejarah, dan nilai-nilai masyarakat yang telah banyak dikomersilkan oleh dua pihak yang berkepentingan yaitu penjual dan pembeli produk wisata. Dipihak penjual kepentingannya adaah ekonomi, sedangkan dari berbagai aspek baik sosiologis, psikologispoitik, ekonomi, kultur maupun lingkungan fisik. Berikut beberapa dampak positif dan negative dari perkebangan pariwisata terhadap lingkungan.

Beberapa dampak positif pariwisata terhadap ingkungan antara lain:

1. Konservasi dan preservasi pada daerah alami
2. Konservasi dan preservasi pada peninggalan sejarah dan situs arkeologi
3. Pengenalan administrasi dan organisasi pada daerah wisata yang dijadikan objek wisata, sehingga daerah tersebut tertata dengan rapi dan banyak dikunjungi wisatawan asing dan lokal

Sedangkan beberapa dampak negatif perkembangan pariwisata terhadap lingkungan antara lain :

1. Pembuangan sampah secara sembarangan dan masif yang dilakukan oleh para turis ketika mereka mendaki gunung, contoh : pegunungan Himalaya di Tibet.
2. Ketidaksihatian dalam menggunakan api unggun ketika berkemah di tempat berkemah atau kebun raya menimbulkan kebakaran.
3. Perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh wisatawan dengan cara memegang dan mengambil sedikit bagian terumbu karang, dengan dalih untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka.
4. Polusi air laut yang ditimbulkan oleh tumpahan oli dan minyak dari motor boat dan juga pembuangan limbah air dalam jumlah besar oleh hotel-hotel yang tinggal di dekat pantai.
5. Reklamasi
6. Pencoretan pada dinding, bagian dari tugu-tugu bersejarah maupun dinding-dinding candi oleh orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut.

7. Ketidakmampuan infrastruktur (fasilitas-fasilitas) untuk menampung jumlah wisatawan pada musim tertentu, sehingga timbul polusi dan kemacetan di daerah wisata.

Merujuk pada studi tentang *our common future* (1987) yang dilakukan oleh *World Commission on environment and development to the United Nations General Assembly*, dan *Earth Summit* di Rio De Jeniero 1992 dalam jurnal HoppStadius (2015), menyarankan agar pembangunan yang dilakukan, termasuk pariwisata harus mengacu pada *sustainable development approach* sebagai isu global. Sebagai sebuah proses, *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan harus memandang bahwa pembangunan merupakan sebuah *integrated system* yang terdiri dari berbagai aspek kepentingan baik nasional maupun internasional, dan dapat menjamin berlangsungnya kehidupan ekologi, sosial budaya serta ekonomi dan merupakan tanggung jawab semua pihak.

2.9.3 Pengelolaan Pariwisata

Menurut Leiper 1990 dalam (Pitana&Diarta,2009:80) pengelolaan merujuk pada seperangkat peranan yang dilakaukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bias juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Dalam pengelolaan pariwisata tentunya mengacu pada prinsip prinsip pengelolaan yang menekankan konservasi. Menurut Cox 1985 dalam (Pitana&Diarta,2009:81-82) adalah sebagai berikut;

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
4. ‘Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif , tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui batas ambang (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas social walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat’.

2.10 Ekowisata berbasis masyarakat (Community based Ecotourism)

Setelah membahas landasan teori tentang pariwisata lanjut landasan teori tentang ekowisata, Namun sebelum melangkah jauh kita akan bahas awal mula Ekowisata mulai menjadi isu nasional di Indonesia sejak di gelarnya Seminar dan Lokakarya (semiloka) nasional yang diselenggarakan oleh Pact-Indonesia dan WALHI, bulan April 1995 di Wisma Kinasih, Bogor. Definisi dsb yang akan dibahas dibawah ini :

2.10.1 Definisi ekowisata

Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Menurut (The internasional ecotourism Society

2015: 19) 'konsep ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang melestarikan lingkungan menopang kesejahteraan masyarakat setempat , melibatkan interpretasi serta pendidikan lingkungan hidup. (Nasikun 1999 : 24) dalam Sandra (2016) ekowisata untuk menggambarkan bentuk wisata yang harus dikembangkan untuk menjaga kesetabilan alam, keindahan alam, dan menjaga sumber daya alam yang notebene bagian daripada pembangunan berkelanjutan.

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2009), ekowisata memiliki banyak definisi, yang seluruhnya berprinsip pada pariwisata yang kegiatannya mengacu pada 5 (lima) elemen penting, yaitu :

1. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Pendidikan diberikan melalui pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatan kegiatan wisata yang kreatif disertai dengan pelayanan yang prima.
2. Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi.
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
4. Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, kegiatan ekowisata harus bersifat profit (menguntungkan).
5. Dapat terus bertahan dan berkelanjutan

Berdasarkan Damanik dkk. (2006) yang dikutip Mulyono (2016) selanjutnya disebutkan ada tiga perspektif ekowisata yaitu

- a. Ekowisata sebagai produk yaitu semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam.
- b. Ekowisata sebagai pasar yaitu perjalanan diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.
- c. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan yaitu metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.

2.10.2 Ekowisata dari segi konsep

The International Ecotourism Society (TIES) pada tahun 1991 dalam Richard (2015) ‘mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan bertanggung jawab untuk menikmati keindahan alam yang menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal’. Sedangkan *World Conservation Union (WCU)* pada tahun 1996 yang dikutip oleh Sarina, Blaca memberi definisi bahwa ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi wilayah yang masih asli untuk menikmati dan menghargai keindahan alam (termasuk kebudayaan lokal) dan mempromosikan konservasi, memiliki efek negatif paling minimum dan menyediakan kesempatan bagi masyarakat lokal, konservasi dalam kegiatan pariwisata. Menurut Eagles (1997) dan Vincent (1996) dalam Sharpley(2000), kegiatan ekowisata ini berbeda dengan kegiatan pariwisata lain, ekowisata mempunyai karakteristik yang spesifik karena adanya kepedulian pada pelestarian lingkungan dan pemberian manfaat

ekonomi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekowisata harus mengikuti prinsip pengelolaan yang berkelanjutan seperti :

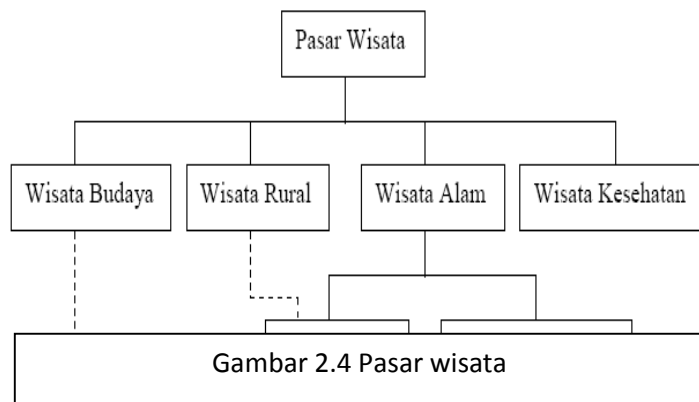
1. Berbasis pada wisata alam
2. Menekankan pada kegiatan konservasi
3. Mengacu pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan
4. Berkaitan dengan kegiatan pengembangan pendidikan
5. Mengakomodasi budaya lokal
6. Memberi manfaat pada ekonomi lokal

Kegiatan ekowisata secara langsung maupun tidak langsung mengarahkan wisatawan untuk menghargai dan mencintai alam serta budaya lokal, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian para wisatawan untuk turut memelihara kelestarian alam. Pengembangan ekowisata selain sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan juga diharapkan dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal (Hijriati:2014).

2.10.3 Ekowisata dari segi pasar

Kata ekowisata selalu mengacu pada bentuk kegiatan wisata yang mendukung pelestarian. Ekowisata semakin berkembang tidak hanya sebagai konsep tapi juga sebagai produk wisata (misalnya: paket wisata). Pada 2 tahun ini, paket wisata dengan konsep "eko" atau "hijau" menjadi *trend* di pasar wisata. Konsep "kembali ke alam" cenderung dipilih oleh sebagian besar 'konsumen yang mulai peduli akan langkah pelestarian dan keinginan untuk berpartisipasi pada daerah tujuan wisata yang

dikunjunginya pada ekowisata harus memiliki kebijakan dan program tersendiri terkait pelestarian lingkungan, budaya setempat, dan manfaat kepada masyarakat lokal'. Karena pada banyak tempat, produk-produk wisata yang dijual kebanyakan menyematkan kata "eko" atau "kembali ke alam" hanya sebagai label untuk menarik konsumen, namun tidak disertai dengan semangat melestarikan atau melibatkan masyarakat setempat dalam produk wisata tersebut. Produk ekowisata dalam pasar wisata secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini:



Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa aktivitas ekowisata menjadi bagian dari wisata alam dan memiliki keterkaitan dengan wisata budaya dan rural. Ekowisata bahkan tidak berhubungan langsung dengan pariwisata yang bersifat tantangan/petualangan atau *adventure*. Perbedaannya, pada ekowisata, aktivitas wisatawan lebih berfokus pada pengamatan dan pemahaman mengenai alam dan budaya pada daerah yang dikunjungi, dengan mendukung kegiatan pelestarian serta lebih mengutamakan fasilitas dan jasa yang disediakan oleh masyarakat setempat. Pada

pariwisata alam, wisatawan sebatas menikmati aktivitasnya pada alam yang dikunjunginya dengan tidak memperhatikan dukungan terhadap pelestarian alam dan budaya serta penggunaan fasilitas dan jasa dari masyarakat setempat. Sedangkan pada pariwisata yang lebih bersifat tantangan/ petualangan (*adventure*), aktivitas yang dilakukan menonjolkan aktivitas fisik yang menantang untuk menunjukkan ego dan kemampuan menaklukkan kondisi tertentu pada alam yang dikunjungi.

2.10.4 Tahapan ekowisata

Karena tidak ada definisi ekowisata yang definitif, banyak muncul perbedaan pendapat dalam menentukan ciri-ciri *ecotourists* (Holden 2000:196) yang dikutip oleh Pulungan (2013) ekowisata merupakan bentuk wisata yang harus bisa di kombinasikan hal-hal sebagai berikut: (1) perjalanan menuju suatu kawasan (seperti hutan alam, kehidupan masyarakat hukum adat, kehidupan perkotaan, dan sebagainya), (2) aktivitas pembelajaran (*learning*) dalam rangka meningkatkan pengalaman wisatawan, (3) menggalakkan upaya konservasi flora, fauna, dan budaya, serta (4) mengembangkan kepedulian dan kapasitas masyarakat lokal. Proses perencanaan kawasan ekowisata untuk menjawab kebutuhan kawasan itu sendiri. Jika suatu kawasan baru teridentifikasi sebagai kawasan ekowisata yang potensial, maka diperlukan penilaian kawasan (baik dari sisi produk maupun pasarnya) untuk menentukan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pengembangan ekowisata. Jika kawasan tersebut telah berkembang dan sedang menghadapi ancaman kerusakan maka perlu didiagnosa penyebabnya sebelum menentukan rencana pengembangan

selanjutnya. Penyusunan rencana harus memperhatikan tiga tujuan pengembangan ekowisata yang dijelaskan Drumm dan Moore (2005:91) dalam Diane (2015) yaitu (1) menghindari ancaman target konservasi alam, (2) mengalokasikan pendapatan untuk konservasi dan pembangunan dan (3) mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata juga harus mampu meningkatkan pengalaman wisatawan itu sendiri dengan memperhatikan tingkat minatnya terhadap lingkungan. Pengetahuan terhadap jenis pengalaman yang dibutuhkan wisatawan dapat menjustifikasi terpenuhinya kebutuhan pengelolaan kawasan secara maksimal dan penentuan paket wisata yang harus diciptakan. Tabel arahan rencana ekowisata tersaji dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Arahan rencana ekowisata

No	Komponen ekowisata	Beberapa arahan rencana
1	Kontribusi terhadap konservasi biodiversitas	<i>Sharing</i> biaya dan manfaat untuk upaya konservasi <i>ecolabeling</i> , <i>ecocertification</i> , dan kampanye.
2	Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat lokal	<i>Guide</i> dari tenaga setempat, souvenir lokal, akomodasi lokal, kegiatan yang meningkatkan <i>length of stay</i> jaminan <i>tenurial</i> , perspektif gender, dan kapasitas pengetahuan/kearifan lokal.
3	Mencakup interpretasi/pengalaman pembelajaran	Membuat jalur interpretasi, menyediakan sarana informasi, paket atraksi yang beragam, inklusi dalam kegiatan alam terbuka dan sosial masyarakat serta kepedulian terhadap kerentanan.
4	Melibatkan tindakan bertanggung jawab dari wisatawan dan industry pariwisata	Wisata dalam bentuk kelompok kecil, evaluasi bersama, keterlibatan multipihak, menghindari eksploitasi atraksi alam dan budaya yang rentan.
5	Berkembangnya usaha skala kecil	Membentuk kelompok usaha produktif, kemitraan usaha, dan jaringan pemasaran promosi.
6	Menggunakan sumber daya baru dan terbarukan	Penggunaan energy lokal, fasilitas yang ramah lingkungan dan introduksi teknologi ramah lingkungan.

7	Fokus pada partisipasi masyarakat, kepemilikan dan kesempatan usaha	Menggunakan tenaga pendamping fasilitator, membentuk tenaga multipihak memberikan peluang sebagai tour operator dan pengelola kawasa, masyarakat sebagai agen perubahan, jaminan peran tokoh dan keberpihakan politik.
---	---	--

Menurut Wood (2002: 10) dalam Aulia (2017) komponen ekowisata itu adalah: (1) kontribusi terhadap konservasi biodiversitas, (2) keberlanjutan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal, (3) mencakup interpretasi/pengalaman pembelajaran, (4) melibatkan tindakan bertanggung jawab dari wisatawan dan industri pariwisata, (5) berkembangnya usaha skala kecil, (6) menggunakan sumber daya baru dan terbarukan, dan (7) fokus pada partisipasi masyarakat, kepemilikan, dan kesempatan usaha, khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Keberhasilan program dan strategi yang disusun oleh pengelola destinasi wisata ditentukan oleh kemampuan pengelola untuk mengajak *tour operator* agar peduli pada penyediaan biaya dan manfaat konservasi (Monteros 2002:1548) Ramsa, Amat (2014) serta kepedulian akan peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk mengurangi *gap* antara teori dan praktek, Li (2013:61) dalam Ramsa, (2014) menilai bahwa promosi keberlanjutan ekowisata berdasarkan komunitas, sumber daya, dan ekonomi dapat mengurangi *gap* tersebut.

Mackay (1994) dalam Nicolie & Daniela membedakan *ecotourists* dengan 3 istilah, yaitu *The little "E"*, *The big "E"*, dan *soft adventurer*. *The little "E"* dicirikan dengan keinginan-tahuan bahwa fasilitas yang disediakan mengikuti standar-standar lingkungan yang dapat diterima. *The big "E"* ingin mengetahui daerah-daerah baru

dan suka menerima akomodasi dan layanan yang ditawarkan masyarakat lokal atau berkemah di alam terbuka. *Soft adventurer* juga ingin mengunjungi alam terbuka tapi dengan syarat sifat dan budaya setempat tidak dieks-ploitasi melalui kegiatan wisata.

Dewi, dkk (2013) dalam Ferdinal (2017) menyatakan pembangunan *Community Based Ecotourism* merupakan model pembangunan menjadikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Begitu pula dengan konsep CIFOR dalam (Hermawan,H:2017) *Community Based Tourism* merupakan pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Sedikit berbeda dengan konsep CBT (*Community Based Ecotourism*) dalam (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah, 2015: 6-7) merupakan pariwisata sadar akan kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. 'Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan keasadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal. 'Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Jadi peran masyarakat lokal sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam mempengaruhi lingkungan mereka (Kholidah. 2017: 39). Dari beberapa definisi *Comunity Based Ecotourism*, dapat disimpulkan bahwa *Comunity Based EcoTourism* menjadikan model pengembangan pariwisata masyarakat berperan aktif dalam

pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan bertanggung jawab pada lingkungan tempat tinggalnya, dengan budaya yang ada tanpa mengubah yang sudah ada. Melalui konsep ini tentunya menggambarkan dimana masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif untuk berpartisipasi dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri. Dimana konsep *Community Based EcoTourism* berkesesuaian dengan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

2.10.5 Indikator Keberhasilan Community Based EcoTourism

Menurut (Suansri,2003:15) Pengoptimalan *Community Based EcoTourism* dapat berhasil apabila beberapa indicator yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Sumber Daya Alam dan Budaya
 - a. Masyarakat memiliki rasa saling memiliki dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri.
 - b. Ekonomi lokal dan modal produksi tergantung pada keberlanjutan penggunaan sumber daya.
 - c. Sumber daya alam terjaga dengan baik
2. Organisasi-organisasi Masyarakat
 - a. Masyarakat berbagai pemahaman tentang kesadaran, norma dan ideologi.
 - b. Masyarakat memiliki rasa saling memiliki dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri.
 - c. Masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan semangat dalam mengelola
3. Manajemen Pengelolaan

- a. Masyarakat memiliki aturan dan peraturan untuk lingkungan budaya dan manajemen pariwisata.
 - b. Masyarakat memiliki perencanaan dalam pembangunan wisata ini (Sustainable development)
 - c. Keuntungan distribusi secara adil bagi masyarakat.
 - d. Keuntungan dari pariwisata memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
4. Pembelajaran (*learning*)
- a. Membina proses pembelajaran bersama antara pengelola dan wisatawan
 - b. membangun pemahaman tentang budaya dan cara hidup yang beragam.
 - c. Meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya dikalangan wisatawan dan masyarakat setempat.

2.11 Kesejahteraan

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari konteks lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Konsepsi dan beberapa konteks Kesejahteraan social akan di bahas dengan kajian.

2.11.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan usaha secara keseluruhan untuk memberikan peningkatan kehidupan manusia berdasarkan konteks sosial. Kebijakan dan layanan

yang berkaitan dengan berbagai kehidupan masyarakat seperti jaminan social, pendapatan, kesehatan, pendidikan dll. Kesejahteraan social merupakan suatu kegiatan oleh beberapa orang atau berkelompok yang telah direncanakan secara sistematis dan professional demi menciptakan individu dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya dan masyarakat selanjutnya atau individu bisa mengatasi masalah socialnya sendiri dengan bantuan tenaga pekerja sosial.

Kesejahteraan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan-kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto,1997).

A. Konsep kesejahteraan

Dalam Undang-undang sistem ketatanegaraan Indonesia, UU RI tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan social, merumuskan kesejahteraan social sebagai : Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Dalam undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya. Permasalahan ini berkembang masyarakat dewasa untuk menunjukkan bahwa warga negara yang masih banyak terpenuhi hak atas kebutuhan dasar secara layak, karena belum mendapatkan pelayanan sosial di negara ini.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun(1993) yang dikutip oleh Nencyana (2017) yang merumuskan sebagai pandangan makna dari konsep martabat manusia yang bisa dilihat dari 4 indikator yaitu: (1) Kesejahteraan(*welfare*), (2) Kebebasan(*freedom*), (3) rasa aman(*security*), (4) jatidiri (*identity*).

Biro Pusat Statistika Indonesia (2000) yang dikutip Nencyana (2017) menjelaskan tentang kegunaan yang melihat indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga dari suatu daerah/wilayah yang memiliki beberapa indikator yang bisa dijadikan ukuran, yaitu:

- 1) Tingkat peningkatan keluarga
- 2) Tingkat pendapatan keluarga
- 3) Komposisi pengeluaran kehidupan rumah tangga sehari-hari dengan membandingkan biaya pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- 4) Tingkat kesejahteraan masyarakat
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

Konsepsi menurut Suharto (2014) memiliki 3 konsepsi yaitu :

- 1) Kondisi kehidupan atau bisa dikatakan keadaan sejahtera, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial

- 2) Institusi, bidang kegiatan yang mengikut sertakan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai lsm /profesi kemanusiaan yang bisa menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- 3) Aktivitas, kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera

Secara umum, kesejahteraan sosial bisa diartikan kondisi sejahtera, dengan keadaan sudah terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup masyarakat. Bersifat mendasar seperti makanan, minuman, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan, dimana tujuan pembangunana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, Kesejahteraan bisa didefinisikan sebagai domain ranah untuk tampilnya pekerja sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena menempatkan kesejahteraan sebagai wadah atau sarana atau wahana atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat (Suharto, 2004).

Namun menurut Drewnoki(1974) dalam Kisworo (2014) untuk melihat konsep kesejahteraan yang memiliki tiga aspek yang meliputi: (1) Melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti kesehatan, tingkat harapan hidup dll, (2)Melihat pada gejala mental(educational status) yang meliputi pekerjaan, pendidikan dll, (3) melihat integrasi dan kedudukan sosial (sosial status).

Hasil Survey Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh BPS membenarkan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar tingkat pengeluaran keluarga tersebut dibandingkan dengan untuk makanan daripada untuk bukan makanan.

Penyelenggara berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) yang bersifat formal maupun informal dengan aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang bersifat berbagai skema jaminan sosial (*social security*) diselenggarakan oleh Negara sosial yang berbentuk bantuan sosial (*social assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*), tunjangan pengangguran (*unemployment benefit*). Skema ini harapan bisa diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial skala kecil, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dimana kesejahteraan menjadi point penting yaitu :

- 1) Sosial ekonomi masyarakat atau rumah tangga
- 2) Struktur kegiatan ekonomi sebagai sektoral menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga dan masyarakat
- 3) Potensi wilayah (sumberdayalam, lingkungan, dan infrastuktur)
- 4) Kondisi kelembagaan yang membentuk jaminan kerja produksi dan pemasaran pada skala local, regional dan internasional (Taslim, 2004)

Jadi bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dimana pluralism kesejahteraan / welfare dimana proses dan menggambarkan situasi yang ada dan kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dimana pengorganisasian hal penting dalam proses peningkatan kesejahteraan sosial.

2.11.2 Tujuan kesejahteraan masyarakat

Tujuan kesejahteraan sosial menurut Fakrudin dalam Desmawati (2015) yang menjelaskan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial merupakan:

- 1) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat lingkungannya, misal dengan adanya sumber-sumber, peningkatan, dan mengembangkan taraf hidup yang bisa dikatakan memuaskan
- 2) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam pencapaian standar kehidupan seperti sandang, papan/rumah, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

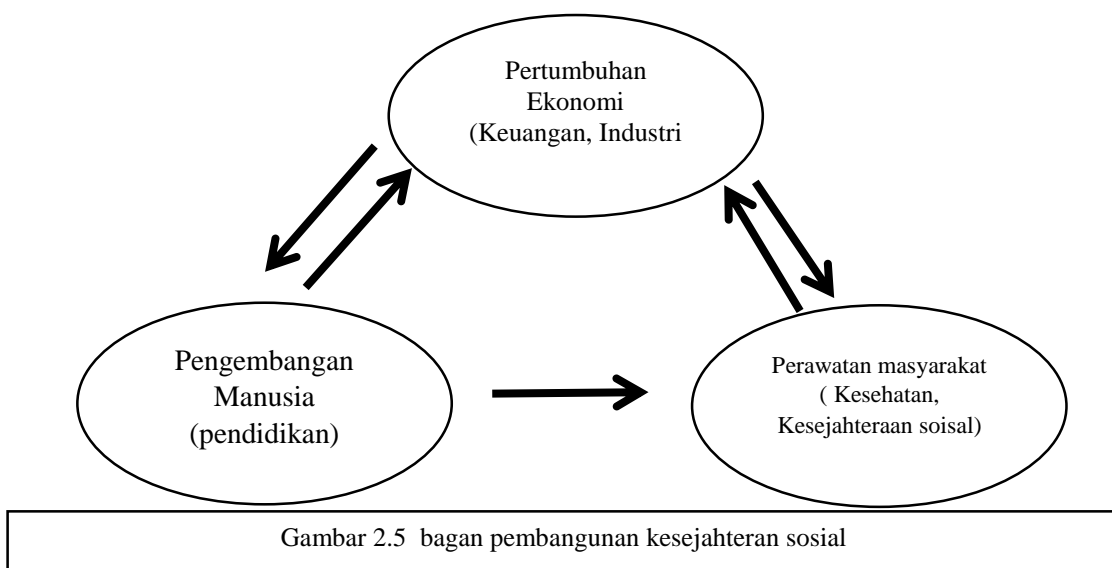
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang telah di rencanakan dan terorganisasi serta berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memnuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, dan memperkuat lembaga sosial (Suharto, 1997)

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- 1) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan system dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan
- 2) Peningkatan standar hidup, seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial yang segenap lapisan, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan memerlukan perlindungan sosial

- 3) Penyempurnaan kebebasan dalam perluasan aksebalitas dan pilihan pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Selain itu Scheinderman (1972) dalam Desmawati (2015) menjelaskan ada tiga tujuan utama dari system kesejahteraan sosial yang sampai sekarang dipakai dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan system, pengawasan system, dan perubahan system. Bagan pembangunan kesejahteraan sosial dalam konteks pembangunan nasional tersaji dalam Gambar 2.5 sebagai berikut:



Gambar 2.5 menjelaskan pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjalankan perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia bisa memiliki posisi yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Kedua fungsi diperlukan mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga bisa berjalan guna mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga

dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Pertumbuhan ekonomi sebagai kepala dalam manusia, maka perawatan masyarakat (kesejahteraan dan kesehatan) bersama pengembangan manusia (sektor pendidikan), karena menjadi pondasi kepala itu.

2.11.3 Fungsi Kesejahteraan sosial

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Fakrudin dalam buku pengantar kesejahteraan sosial yang dikutip dalam Desmawati (2015) yang bertujuan untuk mengurangi tekanan –tekanan karena terjadinya perubahan-perubahan sosial sosioekonomi, menghindarkan terjadi konsekuensinya sosial akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Freindlander & Apte, 1982) dalam Norhafiza (2017)

Fungsi-Fungsi dalam kesejahteraan sosial yang dijabarkan dalam empat fungsi yaitu:

1) Fungsi Pencegahan (preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan memperkuat individu, kelompok/keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial yang baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial yang baru.

2) Fungsi Penyembuhan (curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan mengurangi kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar masyarakat terhindar dari masalah yang dapat

berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Fungsi ini mencakup pada fungsi pemulihan (rehabilitas)

3) Fungsi penunjang (Supportive)

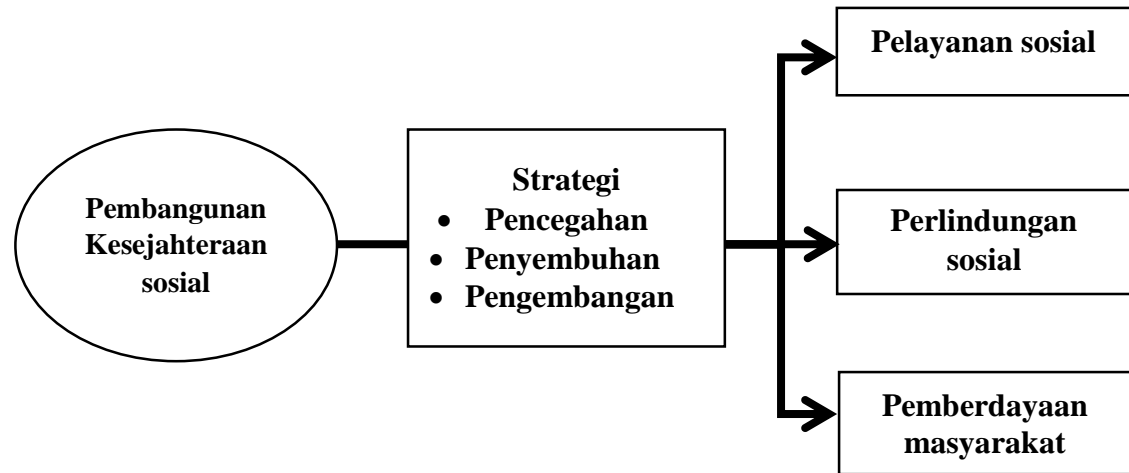
Kesejahteraan berfungsi memberikan bantuan yang mencakup tujuan sektor/wilayah yang meliputi bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

4) Fungsi pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pembanginan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

2.11.4 Fokus pembangunan Kesejahteraan sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merujuk pada definisi *welfare* dari howardjones (1990) yang dikutip dalam Tangian (2015) memiliki focus utama yaitu penanggulangan kemiskinan dalam manifestasi “The achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviations of proverty in its many manifestations” yang menjadikan kemiskinan sebagai manifestasi yang menekan kanfisik dimana penjabaran rendahnya pendapatan (income poverty) atau rumah tidak layak huni Penjelasan Spicker(1995;5) dikutip Nurhalim (2014) yang menyatakan *welfare* (kesejahteraan) dan diartikan sebagai :*wellbeing*: kondisii sejahtera. Namun pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan dan tujuannya tertentu. PKS meningkatkan pada tiga bidang yaitu : pelayananana sosial (*social services*), perlindungan sosial (*social protections*), dan pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*). Bagan fokus pembangunan kesejahteraan tersaji pada Gambar 2.6 sebagai berikut:



Gambar 2.6 Fokus Pembangunan kesejahteraan sosial

2.11.5 Pendekatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dalam buku Charles Zastrow (2000) dalam Nancyana (2017) *Introduction to social work and Social welfare*, ada tiga pendekatan dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu perspektif residual, institusional, dan pengembangan. Ketiga perspektif itu sangat berpengaruh pada bentuk model *welfare state* (Negara kesejahteraan). Penjabaran terkait tiga perspektif yang digunakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial

1) Pendekatan Residual

Pelayanan sosial perlu diberikan apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, bantuan finansial dan sosial diberikan dalam jangka pendek. Dimana perspektif residual sangat dipengaruhi oleh ideology konservatif. Penganut konservatif mengamati bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi pada system yang bekerja di pasar, Program-program pengentasan

kemiskinan yang bergaya jarring pengaman sosial (JPS) dulu kita kenal dengan subsidi BBM merupakan anak kandung dalam faham residual. Pelayanan sosial dapat menerima yang dianggap sebagai klien, pasien, orang yang tidak bisa menyesuaikan diri atau bahkan penyimpang (Parson er.al,1994)

2) Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional usaha kesejahteraan sosial yang bisa di terapkan di masyarakat modern.Perspektif institusional dipengaruhi oleh ideology liberalism yang membawa kepada perubahan yang lebih baik dengan membawa kemajuan (Parson e.al.,1994.Zatrow,2000). Masyarakat dan pasar memerlukan pengaturan dalam menjamin komptesi yang adil dan jujur. Perspktiv ini sangat mendukung model *welfare state* bersifat universal. Seperti yang dinyatakan Zatrow (2000:14), “*government regulations and intervention are often required to safeguard human rights, to control the axcess of capitalism, and to provide equal chances for aces, they emphasize egalitarisnism and the rights if norities*”. Metode ini digunakan untuk mencakup program-program pencengahan, pendidikan, pemberdayaan dan penguataan struktur-strukturkesempatan. Tiga bentuk program yang ditekankan oleh pendekatan intitusional meliputi : penciptaan distribusi pendpaatan, stabulisasi mekanisme pasar swasta, penyedian barang barang public.

3) Pendekatan Pengembangan

Dalam konsepsi pembangunan sosial yang diajukan (1995) buku Social Development menawarkan ide alternative yaitu perspektif pengembangan (*development perspective*) yang memadukan antara pendekatan residual dan instusional (zatrow,2000). Hal itu

sejalan dengan pelibatan tenaga-tenaga professional dalam perencanaan sosial, yang di kemukakan midgley (2005:05):

Selain memfasilitasi dan mengarahkan pembangunann sosial, pemerintah seharusnya membrikan kontribusi langsung pada pembangunan sosial lewat bermacam kebijakan dan beberpa sektor program untuk persefjtir yang mengatur usha pembangunan sosial dan menghasilkan implementasi dari berbagai pendekatan strategi yang berbeda. Perspektif pengembangan yang dapat menangani kemiskinan hal ini sudah di terapkan di beberapa nergara maju, namun belum bisa sepenuhnya di terapkan dan ideology kesejahteraan dengan memiliki tiga strategi peningkatan kesejahteraan sosial yaitu : filantropi sosial, pekerjaan sosial, dan administrasi sosial. Penanganan ini termasuk efektif dibandingkan pendekatan yang lainnya dengan perencanaan nya memberikan dampak secara langsung pada masyarakat yang negaranya menerapkan perspektif pengembangan

2.12 Desa Wisata Sepakung

Terletak didaerah pegunungan dengan ketinggian antara 900-1000 mdpl dan terletak di lembah Telomoyo bagian utara serta berada dipertigaan emas Bandara Adisucipto, Ahmad Yani dan Adisumarmo. Dari masing-masing bandara jarak tempuhnya dari sepakung yaitu 1,5 - 2 jam melalui perjalanan darat. Suhu di daerah Desa Sepakung antara 17-22 derajat celsius. Perjalanan menuju Sepakung dari Salatiga-Ambarawa kemudian mengambil kearah Banyubiru. Sampai Banyubiru langsung ambil arah ke Sepakung dengan jarak dari Banyubiru kurang lebih 7 km

tempat wisata yang terdapat di desa Sepakung antara lain: 1. Cemoro Sewu 2. Kawasan Sendang Ariwulan 3. Goa Semar 4. Gumuk Reco 5. Rencananya akan dibuka pada bulan September adalah Bukit Klarasan yang terletak di Pager Gedog.

Masyarakat desa Sepakung sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai Petani dan Butuh tani yang bergantung pada hasil olahan yang ada di alam sekitar desa Sepakung. ‘Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0424/2015 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang dimana didalam keputusan tersebut tercantum Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru sebagai desa wisata dengan katagori desa wisata potensial. Desa Sepakung mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah dan di dukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian, antara lain tanaman buah-buahan, tanaman pangan, tanaman hias dan tanaman sayuran sentra tanaman pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh desa. Selain itu ada potensi unggulan yang lain yaitu pariwisata, dengan letak geografis desa Sepakung yang mempunyai letak yang strategis dan seperti di atas awan

2.13 Penelitian yang relevan

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang terdahulu sebagai referensi:

1. Penelitian dari Ida Uswatun Hasanah (2016)

Optimalisasi Pemberdayaan Desa Wisata Kandri Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dalam penelitian ini mengangkat optimalisasi Desa Wisata di Kandri dimana untuk upaya pembangunan ekonomi dengan peneliti fokus pada mengerakan masyarakat melalui pemberdayaan dalam

penelitian ini masyarakat di berdayakan untuk upaya peningkatan Ekonomi berkelanjutan di Desa Kandri.

2. Penelitian Ja Aliando (2016)

Penelitian dengan judul “ Optimalisasi kawasan wanawisata grape di Kabupaten Madiun” mengoptimalkan kawasan yang ada di daerah Madiun dengan melihat potensi desa, masyarakat dan Stake holder yang bisa diajak bersama-sama untuk mengerjakan wanawisata yang ada di Desa ini, dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Desa ini, Peneliti fokus pada mengerjakan masyarakat dan sinergitas antara beberapa elemen masyarakat untuk mengoptimalkan wisata ini.

3. M. Soleh Pulungan (2013)

Penelitian dengan judul Optimalisasi Pengembangan Potensi Ekowisata sebagai Objek Wisata Andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim memberikan referensi terhadap pemanfaatan potensi yang ada disana dengan pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat. Peneliti merujuk pada potensi budaya dan alam yang bisa dikembangkan di kutai dengan pendekatan kualitatif. Optimalisasi ini memberikan pencerdasan bagi masyarakat untuk mau lebih genjar dalam mengelola ekowisata yang ada disini.

2.14 Kerangka Berpikir

Desa wisata Sepakung yang focus pengembangan alam ini di-*launching* oleh Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kedu Utara. Objek wisata yang dikembangkan disana dengan memanfaatkan hutan yang cukup lebat, curug, tebing dan

persawahan yang cukup banyak disana. Dengan mengembangkan konsep ekowisata Industri pariwisata sedang gencar disosialisasikan dalam bentuk apapun guna mempercepat pertumbuhan wisatawan dan juga tujuan utama adalah meningkatkan pendapatan penduduk dan devisa negara dari kunjungan wisatawan. Industri pariwisata saat ini di Indonesia sedang bertumbuh dengan baik dari data Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata menunjukkan peningkatan wisatawan domestik dan mancanegara dari tahun ketahun.

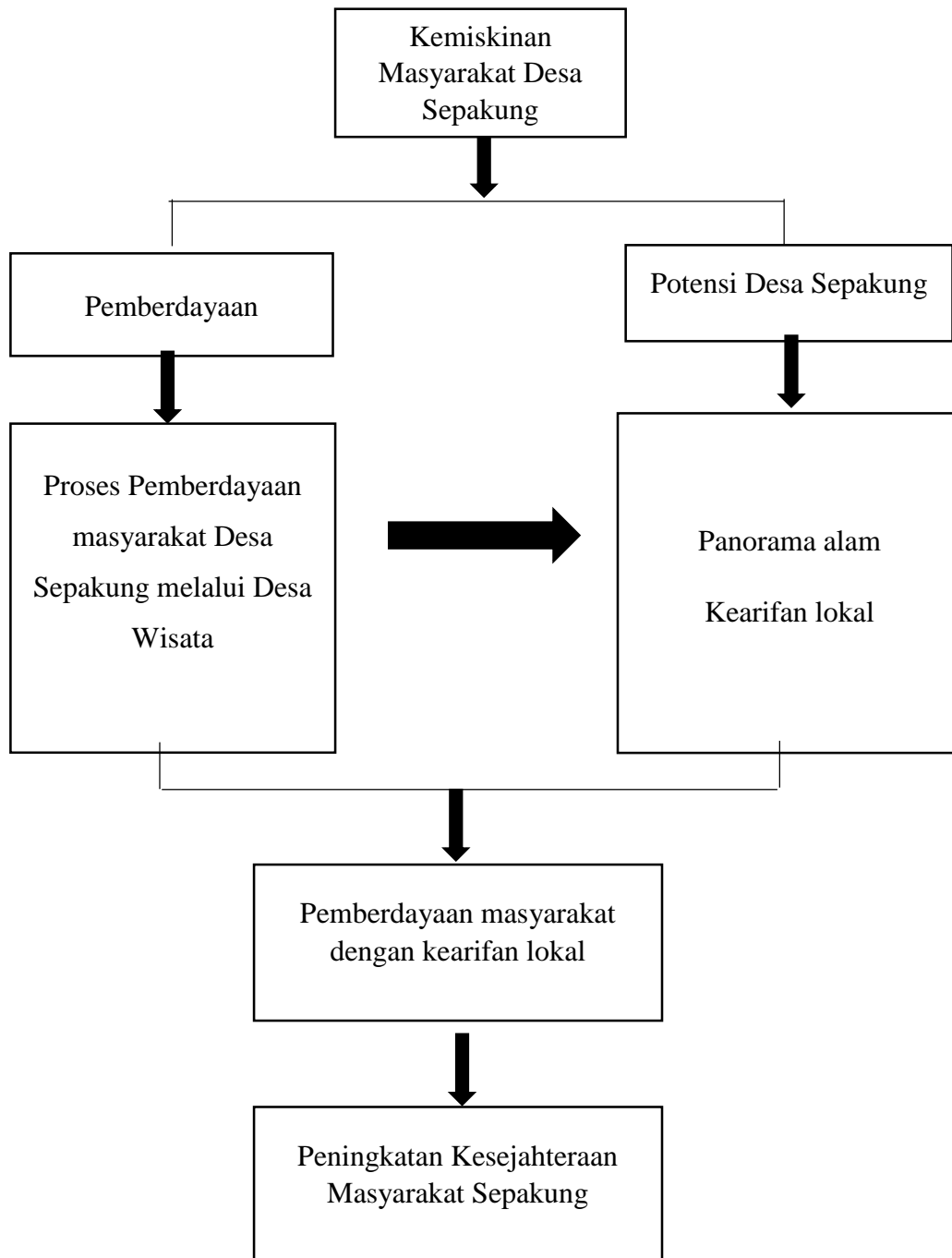
Tidak sedikit dari beberapa objek wisata yang sebenarnya dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi, namun tidak terawat dan terbengkalai, akhirnya objek sepi pengunjung atau ada sebagian objek wisata yang sebenarnya terawat dengan baik namun ada beberapa dari objek wisata tersebut tidak bisa melihat apa yang menjadi potensi dan penghambat baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar akhirnya objek wisata tersebut kalah bersaing dengan objek wisata yang lain.

Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang sudah cukup terkenal. Dengan menganalisa potensi Desa Sepakung akan dapat mengetahui potensi yang ada disana serta faktor pendukung dan penghambat pengoptimalan ekowisata ini. Lalu fasilitas yang sudah ada akan menjadi sebuah kekuatan dan peluang untuk menjadi lebih berkembang, tetapi tidak hanya memikirkan kemajuan untuk jangka pendek saja akan tetapi harus juga memikirkan rencana jangka panjang dalam memajukan ekowisata ini. Untuk diperlukan analisis yang tepat agar bisa mengetahui pengembangan dengan menganalisa beberapa variabel antara lain daya Tarik,

transportasi, akomodasi, pengadaan fasilitas layanan dan layanan sarana (infrastruktur). Pengoptimalan ekowisata berbasis ekowisata kearifan lokal ini harus bisa berkesinambungan dengan konsep *sustainable tourism* dalam artian sempit ukuran keberhasilan pengembangan suatu keadaan pariwisata yang baik dengan konsep *sustainable tourism* tidak hanya mengedepankan indikator ekonomi akan tetapi juga mengikutsertakan indikator sosial dan budaya dalam pengukuran keberhasilan konsep *sustainable tourism*.

Masyarakat masih awam dalam istilah *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan, banyak juga pariwisata yang ada disekitar lingkungan dimana dengan pengoptimalan ekowisata berbasis kearifan local kita juga tanpa sadar sudah menerapkan beberapa indikator konsep *sustainable tourism dalam* kebijakan untuk membangun keberadaan pariwisatanya. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan juga mempunyai hambatan. Salah satu hambatan penting adalah eksploitasi yang wajar sumber daya alam, yang dipromosikan hanya untuk membiayai pembangunan program jangka pendek. Dengan pikiran pertimbangan ini, maka dianggap perlu untuk melakukan studi perencanaan pariwisata berkelanjutan terutama di tingkat lokal daerah otonom. Faktor lain yang mudah menjadi kendala utama bagi Indonesia adalah terbatasnya pendanaan.. Di sisi lain, pembangunan destinasi yang baru di beberapa daerah juga membutuhkan dana besar untuk mampu memenuhi berbagai persyaratan dan kriteria. Untuk lebih jelasnya kerangka pikiran yang dibangun

dalam penelitian ini akan peneliti sajikan dalam pada Gambar 2.7 seperti sebagai berikut:



Gambar 2.7 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Upaya optimalisasi pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi peningkatan kesejahteraan Desa Sepakung dari beberapa indikator yang di teliti bisa ditarik kesimpulan :

1. Optimalisasi pengembangan Ekowisata berbasis kearifan lokal dilakukan oleh masyarakat Sepakung melalui PJ (PenanggungJawab) disetiap obyek wisata. Pengelolaan Ekowisata tiap tahun mengalami peningkatan, awalnya hanya satu yang obyek wisata kemudian berkembang menjadi 4 obyek wisata. Masyarakat diberi keleluasaan untuk mengoptimalkan potensi Desa Wisata ini.
2. Optimalisasi ekowisata ini terkendala dana yang hanya memanfaatkan hasil penjualan tiket wisata. Hal ini menjadikan pembangunan dalam pengembangan Desa Wisata ini terhambat. Sedangkan faktor pendukung optimalisasi ekowisata melalui penetapan Desa digital menjadikan kemudahan media promosi.
3. Desa Wisata ini sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sepakung yang dilibatkan langsung pada pengelolaan Desa Wisata. Masyarakat memiliki penghasilan tambahan dari berdagang, menjadi ojek, pengelola homestay dan penjaga wahana.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Optimalisasi pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal ini maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Desa Wisata Sepakung perlu melakukan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan potensi desa yang belum di manfaatkan agar tetap menjadi Desa Wisata andalan wistaawan.
2. Desa Wisata Sepakung perlu melengkapi sarana prasaran yang menjadi penunjang pengoptimalan Desa Wisata ini
3. Pengelola dan Masyarakat Sepakung menjaga keharmonisan dan menjalin komunikasi dengan baik guna menjaga sinergitas dan tujuan bersama meningkatkan perekonomian di Desa Sepakung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Eka, H. W. (2018) Pembangunan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan*, 29-33
- Alfitri. (2011), *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Andini, N. (2013), Pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Studi Kasus : Desa Wisata Kembangrum, Kabupaten Sleman, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 24 No.3. ,175
- Andriyani, A. A. (2017). *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)”*. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 23 (1-16).
- Arif Su’udi, D. S. (2015), Perencanaan konsep pengelolaan dan peningkatan pembangunna kawasan wisata hutan mangrove desa Bedono Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, *Jurnal Ruang Volume 1 Nomor 2*, 52-53
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Bina Aksara
- Asmin Ferdinal, 2017, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Padang : Padang Media offset Arida,
- Aulia, Afifah. 2017. *“Pengembangan Potensi Ekowisata Sungai Pekalen Atas Desa Ranu Gedang, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo”* *Jurnal Wilayah dan Lingkungan ejournal2.undip.ac.id* Volume 5 No 3 Desember.
- Bagus Kisworo, N. S. (2014). Partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna Desa (Studi Pada Pemuda di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
- Baskoro, BRA & Cecep Rukendi, 2008, *“Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Obyek wisata Ciater Jawa Barat”* *Jurnal Kepariwisata Indonesia Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia*, vol.3 No 1 Maret, 6-7.
- BPS. 2018. *“Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018”*. *Jurnal Badan Pusat Stastistik RI*
- BPS (Badan Pusat Stastistik) 2017, Kabupaten Semarang dalam angka 2017, Kabupaten Semarang: BPS.
- Conyers, Diana, (2007), *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (Penerjemah Susetiawan)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- .Desmawati, L., Rifai, A., & Mulyono, S, E,. (2015) *“Penanggulangan Masyarakat Miskin Kota Rawan Kriminalitas Melalui Pmeberdayaan di Jalur pendidikan*

- Nonformal di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education State University*. 1.(1) Hal 85.
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta : Pustaka Belajar Press, 2012).
- Hajaroh Laela, Sungkowo Edi (2014). “Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri, Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal NFECE* 3(2).
- Hariyanto, Joko. (2014). “ Model Pengembangan Ekowisata dalam Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY”. *Jurnal KAWISTARA Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multimedia Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan Vol.3 No.3. Desember*.
- Hijriati, Emma (2014). “Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan : Desember 2014, hlm 146-159*
- Hoppstadius, Fredrik. (2015).“Processes of Sustainable Development: Ecotourism in Biosphere Reserves”. *Journal of Environmental and Tourism Analyses*Vol. 3. 1 (2015) 5-25
- Ife,J,W, (1995) *Community Development:Creating Community Alternative-vision, Analysis and Practice*, Melbourne : Longman
- Ife, Jim. W. (2006) *Community Development Alternative –Based in on Age of Globalisation*, Pearson Eduaciton Australia, Melbourne : NSW
- Imaniar, Mahrati dan Joko Sutarto. (2019) “ Songket Fabric weaving training in empowering poor woment home industy in Bima city, West Nusa Tenggara. *Journal of Nonformal Education X(X)*.
- Joko Sutarto, S. E. (2015), *Kewirausahaan Masyarakat melalui Desa Vokasi di Desa Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, 42-49.
- Khairuddin,(2000), *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek : Sosiologis, Ekonomi dan Perencanaan*, Yogyakarta : Liberty.
- Moleong Lexy. J. (2006). *Metodologi Peneltian Kualitatif*, Bandung. Pt Remaja Rosdakarya.
- Mu’arifuddin, Mulyono, S. E., & Malik, Abdul (2016). *Analisis Kebutuhan Pengembangan Desa Wisata Batik Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Journal of Nonformal Education*. 2(1). Hal 53 Univeristas Negeri Semarang.

- Mulyono, S. E. (2017) “Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Ombak.
- Muslikhah, Khomsun Nurhalim (2014). “Penyenggaraan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan dalam peningkatan ekonomi petani watina (studi pelatihan pengemukan kambing di Desa Kalimanggis Kabupaten Batang). Jurnal NFECE 3(1).
- Mustangin, Kusniawati, D. Islami, N,P Setyaningrum, B,. (2017), Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi lokal Melalui Desa Wisata di Bumiaji, Journal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2.(1).
- Natalia, Nencyana. 2017. ”Potensi Ekowisata dan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Vol 2 No 2. Desember.
- Norhafiza Md Sharif. (2017). “Sustaining the Entrepreneurship in Rural Tourism Development”. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol. 4, No. 6, December 2017.
- Nicolaie, Daniela (2015). “Sustainable Tourism Destinations: Cultural Sites Generated by Romanian People of Genius a Potential Resource for Cultural Tourism”.Journal of Environmental and Tourism Analyses Vol. 3. 1. 92-105.
- Pendit, Nyoman S.2002. *Sebuah Pengantar Pariwisata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021.
- Peraturan Menteri 33 Th 2009 Tentang pedoman pengembangan ekowisata di Daerah.
- Pitana,I Gede dan I Ketut Surya Diarta (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*.Yogyakarta. Andi Offest
- Pulungan, Soleh (2013). “Optimalisasi Pengembangan Potensi Ekowisata sebagai Objek Wisata Andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim” Jurnal Bina Praja : vol5 No 3 : Februari.
- Putri, Sandra. Dhesitta (2015). “Strategic Management of Nature-Based Tourism in Ijen Crater in the Context of Sustainable Tourism Development”. J.Ind. Tour. Dev. Std., Vol.3, No.3, September,
- Răcășan, Bianca. Sorina (2016). ‘Tourism potential value assessment model for rural-mountain and boundary contact areas. Case study: Cluj County, the district of Ciceu and the balneal area of Bacău County (Romania)’. Journal of Environmental and Tourism Analyses Vol. 4. 1 74-96.
- Richard Sharpley, (2000) “Tourism and Sustainable Development : Exploring the Theoretical Dvice,” Jurnal Of Sustainable Tourism, VIII(1), 1-19.

- S. Edy Mulyono, K. H. (2015). Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kewirausahaan produk nggulan pada program Desa Vokasi Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, 88-92.
- Soleh,Ahmad 2017. “ Strategi pengembangan potensi desa”. *Jurnal Sungkai Vol.5 No.1*. Februari 2017 Hal :32-52.
- Suansri, Potjana (2003) *Community Based Ecotourism Handbook (Thailand : Rest Project)*
- Sugiono (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi (2014), *Membangun masyarakat membrdayakan rakyat(kajianstrategis pembangunan kesejahteraan dan pekrejaan sosial)* Bandung. Pt Refika Aditama
- Sukma,I Nyoman.(2015). *Pariwisata Berkelanjutan*. Bali: Sustainpress.
- Sulistiyastuti, Dyah ratih & Erwan agus Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sumodiningrat, G, (1999), *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta : Gramedia
- Sungkowo, Edi (2014). ” Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang”
- Sungkowo, Edi (2015). “Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Literasi Berbasis Kewirausahaan Usaha Mandiri Melalui PKBM Kota Semarang”. *Journal of Nonformal Eduaction*. Vol1 No.1.
- Tangian, Diane. (2015), ‘Model of Ecotourism Management in Small Islands of Bunaken National Park, North Sulawesi’. *J.Ind. Tour. Dev. Std.*, Vol.3, No.2, April.
- Utsman, 2017. *Validitas dan Reabilitas untuk mengevaluasi Mutu Pnelitian Kualitatif*.
- Widayanti,Sri. (2012). “Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Balai Besar Penidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang Kementrian Sosial RI Vol 1, No 1*.
- Wulandari, Putri. 2018. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Desa Wisata Studi Kasus Desa Sepakung, Banyubiru, Kabupaten Semarang”. *Jurnal dalam Seminar Pembangunan Upgris*.
- Yaman, Amat Ramsa & A.Mohd, (2004) “Community-based Ecotourism: New Proposition for Sustainable Development anf Enviroment Conservation in Malaysia”. *Journal of Applied Sciences IV (4) : 583-589*.

Zakaria, Faris dan Rima Dewi S. (2014). "*Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*". Jurnal Teknik Pomits. 3 (2) C-245-C-249.